Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

Tahun 2025



INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN NGANJUK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt atas selesainya penyusunanan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025. LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam pencapaian RPD 2024-2026 serta RENSTRA Tahun 2025-2029.

LKjIP Tahun Anggaran 2025 juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah dilaksanakan dan merupakan sumber informasi ke arah perbaikan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Melalui usaha keras serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di bidang pengawasan, target dapat dicapai dengan baik.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya saran untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program ke depan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Landasan Hukum 1

C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi 2

D. Isu Strategis 6

E. Sistematika Penulisan 7

II. PERENCANAAN KINERJA 9

A. Ikthisar/ ringkasan Renstra/ Renja 9

B. Perjanjian Kinerja 12

III. AKUNTABILITAS KINERJA 17

A. Capaian Kinerja Organisasi 17

A.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 17

A.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 23

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra 28

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional 35

A.5 Analis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan 42

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 45

A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja 47

B. Realisasi Anggaran 54

IV. PENUTUP 59

LAMPIRAN - LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Berdasarkan RPD 2024 - 2026 dan Renstra 2025 - 2029)

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (berdasarkan RPD 2024 - 2026 dan Renstra 2025 - 2029)

C. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)

D. Bukti Dukung Kinerja Lainnya yang mendukung tercapainya kinerja/outcome OPD baik pada level Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

BAB I
PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Berdasarkan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

b. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Peraturan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

c. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

a) Fungsi

Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah tanpa menunggu penugasan dari Bupati;
h. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pememerintah Pusat; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

b) Susunan Dan Struktur Organisasi

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :

1. Inspektur
2. Sekretariat, membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Reformasi Birokrasi
8. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD.

Bagan Susunan Organisasi :



Dari bagan struktur organisasi di atas, SDM Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia (SDM) APIP
Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2025

No	NAMA	NIP	GOL	PEND.	JABATAN
1	SAMSUL HUDA, SH, MH	19660810 199203 1 011	IV/c	S2	Inspektur Daerah
2	DWI TRISTANTI, SE,M.AP	19720302 20060 4 2 016	IV/a	S2	Inspektur Pembantu I
3	AGUNG ENDRO LAKSONO, S.T., M.A.P	197711092006041012	IV/a	S2	Inspektur Pembantu II
4	FEFRI HENDRO WASONO, S.Sos, MM	19750803 199803 1 006	IV/b	S2	Inspektur Pembantu IV
5	SUDARMONO, AP, MM	19760213 199412 1 001	IV/b	S2	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif,

No	NAMA	NIP	GOL	PEND.	JABATAN
					PPTK dan Reformasi Birokrasi
6	SUTANTO ADI S, SE	19660620 199602 1 002	IV/a	S1	PPUPD Madya
7	RIZKY RUSMAWATI, S.STP, M.Si, CRMO	19850110 200312 2 002	IV/a	S2	Auditor Madya
8	IDA AYU DEWI, SE	19721113 200801 2 007	III/d	S1	Kasubbag Umum dann Keuangan
9	LUTFI ASHARI, SE	19790307 200604 1 014	III/d	S1	Auditor Madya
10	INTAN ESY NURWAYA, ST	19800327 200903 2 004	III/d	S1	Auditor Madya
11	NURIMA JIWAYANTI, SH	19870910 201001 2 018	III/d	S2	Auditor Madya
12	RENY PRIHASTUTI, SE	19720312 200604 2 027	III/d	S1	Auditor Muda
13	NOVARINA DIAN WARDANI, SP	19781123 201001 2 002	III/c	S1	Auditor Muda
14	SUMARYANA, SE	19710222 200604 1 008	III/c	S1	PPUPD Muda
15	WAHYU DWIPRASETYA, SE	19791017 200901 1 006	III/d	S1	Auditor Muda
16	PIYA FHATORONI, S.Kom	19821021 201001 1 015	III/d	S1	Pranata Komputer Muda
17	ARI WIDODO, SE	19840301 200604 1 008	III/c	S1	Auditor Muda
18	MUNDARWATI, SE	19770908 201101 2 003	III/c	S1	Auditor Muda
19	ANAS NASRULLAH, A.Md	19820420 200903 1 006	III/c	S1	Auditor Muda
20	HENI PURWANTI, SE, CGAA	19841102 201903 2 011	III/b	S1	Auditor Muda
21	DENADA ANGGIA LALITA, SE, CGAA	19841017 201903 2 011	III/b	S1	Auditor Muda
22	ZANUAR ACHMAD AFANDI, S.Akun	19910102 201903 1 009	III/b	S1	Auditor Pertama
23	SHINTA MEIGA MAYANGSARI, SE	19890515 202012 2 004	III/b	S1	Auditor Pertama
24	RIZKI SEPTIANI, SE	19970909 202012 2 007	III/b	S1	Auditor Pertama
25	KARTIKA IKA WULANDARI, SE	19940127 202012 2 006	III/b	S2	Auditor Pertama
26	GAGOT SULISTYO, S.Ak	19960728 202012 1 004	III/b	S2	Auditor Pertama
27	ZAM PERMITASARI, S.Ak	19970829 202012 2 004	III/b	S1	Auditor Pertama
28	SAKA RAHARDIAN, ST	19920910 202203 1 003	III/b	S1	Auditor Pertama
29	FESTYAGUSTI HARDIKASARI, ST	19890801 202203 2 001	III/b	S2	Auditor Pertama
30	WIRAWAN YUDA PRIHATAMA, ST	19931009 202203 1 001	III/b	S1	Auditor Pertama
31	ABDUL HADI, A.Md	19800408 201101 1 008	III/b	D3	Pengelola Barang Milik Daerah
32	YOLANDA AFRIYANTI, A.Md	19920402 202203 2 002	II/d	S1	Auditor Terampil
33	RIZKI NURUL FADHILAH, A.Md.T	19980327 202203 2 006	II/d	D3	Auditor Terampil
34	RIDHO AGUNG LAKSONO, A.Md. Ars	19980801 202203 1 002	II/d	D3	Auditor Terampil
35	ARIQ HASYEMI RAFSANJANI, A.Md.t	19990613 202203 1 002	II/d	D3	Auditor Terampil
36	LAILA KHOTAMIL NUR AZIZAH, A.Md	19951018 202203 2 005	II/d	D3	Auditor Terampil
37	CHUSNUL KHOIRIYAH, A.Md	19950526 202203 2 006	II/d	D3	Auditor Terampil
38	AGY WAHYU SALINDRA, A.Md.Ak.	19970611 202203 1 002	II/c	D3	Auditor Terampil

No	NAMA	NIP	GOL	PEND.	JABATAN
39	APRILIA FAJAR ADHANI, A.Md	19770418 202203 2 004	II/c	D3	Auditor Terampil
40	DINA JUANITA TRI SANTI, A.Md	19960624 202203 2 003	II/c	D3	Auditor Terampil
41	BAROKAH SAKTI SATRI W, A.Md	19950406 202203 1 002	II/c	D3	Auditor Terampil
42	ARMILA MAZIDATUR ROSYIDAH, A.Md	19941214 202203 2 002	II/c	S1	Auditor Terampil
43	NINDYA YULAQFITA RIFAMATU FIRIZKI, A.Md.T	19990729 202203 2 004	II/c	D3	Auditor Terampil
44	JONO	197112252007011019	II/c	SLTA	Pengemudi
45	SARIJO	19811230 202001 1 003	II/b	SLTA	Pengadministrasi Umum

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2025

TABEL 1.2
REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

Klasifikasi			Jumlah Total	Laki-laki	Perempuan
A.	Status Kepegawaian				
	-	ASN	45	22	23
	-	PPPK Paruh Waktu	11	5	6
		Jumlah	**56**	**31**	**31**
B.	Pendidikan ASN				
	-	Magister (S2)	11	5	6
	-	Sarjana (S1)	21	10	11
	-	Sarjana Muda/Diploma III	11	5	6
	-	Diplioma II	0	0	0
	-	Diploma I	0	0	0
	-	SLTA	2	2	0
	-	SLTP	0	0	0
	-	SD	0	0	0
		Jumlah	**45**	**22**	**23**
C.	Pendidikan Paruh Waktu				
	-	Sarjana (S1)	7	1	6
	-	SLTA	4	4	0
		Jumlah	**11**	**5**	**6**
D,	Pangkat dan Golongan				
	-	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1	0
	-	Pembina Tk. I (IV/b)	3	3	0
	-	Pembina (IV/a)	5	2	3
	-	Penata Tk. I (III/d)	7	3	4
	-	Penata (III/c)	3	2	1
	-	Penata Muda Tk. I (III/b)	12	5	7
	-	Penata Muda (III/a)	0	0	0
	-	Pengatur Tk. I (II/d)	12	4	8
	-	Pengatur (II/c)	1	1	0
	-	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	1	0
	-	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
	-	Juru Tk. I (I/d)	0	0	0
	-	Juru (I/c)	0	0	0
	-	Juru Muda Tk. I (I/b)	0	0	0
	-	Juru Muda (I/a)	0	0	0
			45	**22**	**23**
E	Pejabat Struktural				
	-	Eselon II	1	1	0
	-	Eselon III	4	3	1

Klasifikasi			Jumlah Total	Laki-laki	Perempuan
	-	Eselon IV	1	0	1
			6	**4**	**2**
F.	Pejabat Fungsional				
	1.	JFA :			
		Auditor Madya	4	1	3
		Auditor Muda	8	3	5
		Auditor Pertama	9	4	5
		Auditor Pelaksana	12	4	8
			33	**12**	**21**
	2	PPUPD :			
		PPUPD Madya	1	1	0
		PPUPD Muda	1	1	0
			2	**2**	**0**
	-	Pranata Komputer Muda	1	1	0
		Jumlah	**42**	**19**	**23**
G.	Jabatan Pelaksana				
	-	Pelaksana	3	2	1
		Jumlah	**3**	**2**	**1**

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk

d. Isu-isu Strategis (*strategic issued)* yang sedang dihadapi Organisasi

Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP juga mempunyai tugas melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk terdapat permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan penjaminan kualitas perencanaan tingkat Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah
2. Kompetensi pegawai khususnya pada SATGAS-SPIP struktur pengelola risiko terkait manajemen risiko perlu ditingkatkan
3. Proses penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya memadai dan masih sebatas pemenuhan formal, karena belum dilakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko
4. Sebagian besar SKPD belum memiliki risk register terkait fraud/pencegahan korupsi
5. Kurang optimalnya koordinasi untuk peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan SPIP antar SKPD terkait yaitu dengan BAPPEDA, Sekretariat Daerah, BPKAD, BKPSDM, dan Inspektorat

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dirumuskan isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani dalam waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Unit Pengelola Risiko Pemerintah Daerah, Unit Pengelola Risiko Perangkat Daerah dan Penjamin Kualitas dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi
2. Standart Operasional Prosedur (SOP) implementasi sistem pengawasan Daerah
3. Inovasi pengawasan daerah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Seiring dengan penetapan **Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025** dan arah kebijakan pengelolaan risiko terbaru, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang menjadi fokus penanganan Inspektorat Daerah, antara lain:

1. Tuntutan penerapan SPIP dan MRI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang lebih efektif
2. Tuntutan pelaksanaan Penjaminan kualitas pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan guna tercapainya efektivitas kinerja serta akuntabilitas instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang lebih baik
3. Tuntutan penguatan APIP yang lebih optimal
4. Rendahnya integritas ASN dalam memberikan layanan public
5. Tuntutan optimalisasi pencegahan korupsi melalui *Monitoring, Center for Prevention (MCP)*, dan Survey Penilaian Integritas (SPI)

e. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 000.8.6.3/67/411.000/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I - PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum/Latar Belakang,
b. Landasan Hukum,
c. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
d. Isu-isu Strategis (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Organisasi

e. Sistematika Penulisan

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

a. Ikhtisar/Ringkasan Rencana Strategi/ Rencana Kinerja Tahunan

b. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional;

A.5 Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

A.7 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan pencapaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV - PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan RPD 2024-2026 dan Rentra 2025-2029)
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah berdasarkan RPD 2024-2026 dan Rentra 2025-2029)
3. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)
4. Bukti Dukung kinerja lainnya yang mendukung tercapainya kinerja/outcome OPD baik pada level Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

a. Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja

Rencana strategis perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangakat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas fungsi perangkat daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) saat masa Jabatan Kepala Daerah berakhir.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Nganjuk pada tahun anggaran 2025 merupakan periode transisi kepemimpinan dan perencanaan strategis. Dengan telah **ditetapkannya Kepala Daerah definitif pada awal tahun 2025**, Pemerintah Kabupaten Nganjuk melakukan percepatan transformasi kebijakan dari rencana masa transisi (RPD 2024–2026) menuju visi-misi kepala daerah terpilih yang dituangkan dalam RPJMD 2025-2029.

- **Rencana Strategis 2024-2026**

Periode Transisi (Renstra 2024-2026) Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Nganjuk pada periode Renstra 2024-2026 memedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) transisi dengan tujuan dan sasaran :

Tujuan :

Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Sasaran :

Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima

Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik selaras dengan arah kebijakan daerah tersebut, Inspektorat Daerah menetapkan tujuan strategis yaitu :

"Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi" yang diukur melalui indikator **nilai Maturitas SPIP**.

Tujuan ini disinkronkan ke dalam sasaran perangkat daerah yang meliputi:

No	Sasaran OPD	Indikator Kinerja
1	**Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart
2	**Sasaran Strategis 2:** Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP
3	**Sasaran Strategis 3:** Meningkatnya kualitas Pengendalian Risiko	Indeks Manajemen Risiko
4	**Sasaran Strategis 4:** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkungan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan berpredikat SAKIP ≥ BB
5	**Sasaran Strategis 5:** Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
6	**Sasaran Strategis 6:** Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center For Prevention (MCP)

- **Rencana Strategis 2025-2029**

Periode Strategis (Renstra 2025-2029) Memasuki tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Nganjuk melakukan percepatan transformasi kebijakan menuju visi-misi Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam RPJMD 2025-2029.

Rencana Strategis Inspektorat Nganjuk yang berkesinambungan dengan VISI, MISI Bupati Nganjuk, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Visi :

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Inspektorat turut mendukung visi :

> Mewujudkan Kabupaten
> Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat

- Misi

Menuju pencapaian visi tersebut maka Inspektorat Kabupaten Nganjuk turut andil dalam pencapaian Misi ke 2 (dua) yaitu :

> Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan

- Tujuan Renstra Strategis

Sejalan dengan visi bupati tersebut, Inspektorat Daerah menetapkan tujuan strategis yang diperbarui yaitu:

"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi".

- Sasaran Rencana Strategis

Berdasarkan Tujuan Rencana Strategis kemudian diturunkan secara sinkron ke dalam sasaran strategis Inspektorat :

Meningkatnya pemerintahan berintegritas dan pengawasan berkualitas

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan alat ukur yang penting untuk menilai pencapaian kinerja dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Nganjuk. Dengan mengacu pada misi Bupati yang berfokus pada peningkatan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan. Berikut adalah IKU Inspektorat Kabupaten Nganjuk :

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk	Nilai Kapabilitas APIP
2	Meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko
3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal
4	Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP	Indeks Pencegahan Korupsi daerah

2.3 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk mencakup program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Secara kontraktual pada awal tahun anggaran, perencanaan ini disusun dengan mengacu pada **Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026 yang telah dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026**. Di dalam Rencana Kerja Tahunan tersebut, dituangkan rencana target yang diharapkan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik kegiatan utama maupun kegiatan penunjang, yang masing-masing memiliki indikator berbasis kinerja.

Namun, sejalan dengan dinamika kebijakan daerah, telah ditetapkan **Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029** pada tanggal **19 September 2025**. Penetapan Renstra baru ini membawa implikasi langsung terhadap struktur perencanaan tahunan pada sisa periode tahun berjalan.

Dengan demikian, penyajian Target Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diuraikan ke dalam dua bagian, yaitu target berdasarkan perencanaan awal (Renstra 2024-2026) yang telah dilakukan pengendalian dan evaluasi dan target hasil penyesuaian berdasarkan Renstra 2025-2029 sebagai berikut:

b. Perjanjian Kinerja

Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan. Di dalam Rencana Kerja, ditetapkan target capaian kinerja tahun berjalan untuk seluruh indikator kinerja yang kemudian dituangkan dan diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK).

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Pada Tahun 2025 Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Nganjuk. Mengingat adanya transisi regulasi perencanaan dengan ditetapkannya **Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**, maka dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 disusun dengan memilah dua indikator sebagai berikut:

1. **Indikator Kinerja Mandat Renstra 2024-2026 (Transisi)** Pada awal tahun anggaran, Inspektorat Daerah menetapkan target pada 7 indikator kinerja yang menjadi mandat dalam dokumen perencanaan transisi dengan total dukungan anggaran sebesar Rp22.788.543.327,-. Sasaran dan target yang dikawal, antara lain:

- Kualitas Pengawasan Akuntabel: Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standar dengan target 32%.
- Kapabilitas APIP: Peningkatan profesionalisme aparat dengan target nilai 3.010.
- Manajemen Risiko: Peningkatan kualitas pengendalian risiko dengan target indeks 3.200.
- Akuntabilitas Kinerja (SAKIP): Persentase Perangkat Daerah berpredikat SAKIP ≥ BB dengan target 76.
- Tindak Lanjut Rekomendasi: Penyelesaian hasil pengawasan internal (APIP) sebesar 90.50% dan pemeriksaan eksternal (BPK) sebesar 94.90%.
- Pencegahan Korupsi: Pencapaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (MCP) dengan target 92.

2. **Indikator Target Baru Berdasarkan Renstra 2025-2029** Pasca ditetapkannya Perbup Nomor 29 Tahun 2025 pada tanggal 19 September 2025, Perjanjian Kinerja kemudian disesuaikan (reviu/perubahan) untuk mengakomodir target strategis baru yang menjadi prioritas Bupati terpilih dalam periode jangka menengah ke depan dengan penyesuaian total anggaran menjadi Rp15.464.551.612. Target baru ini meliputi penajaman pada:
   - Penguatan APIP: Penyesuaian target Nilai Kapabilitas APIP menjadi 3.005.
   - Kualitas Pengendalian Risiko: Mempertahankan fokus pada Indeks Manajemen Risiko dengan target tetap pada angka 3.200.
   - Integrasi Penyelesaian Tindak Lanjut **:** Menyatukan sasaran penyelesaian hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal dengan target masing-masing tetap di angka 90.50% (Internal) dan 94.90% (Eksternal).
   - Akselerasi Pencegahan Korupsi**:** Peningkatan target Indeks Pencegahan Korupsi secara signifikan dari semula 92 menjadi 95.2

Melalui pemilahan ini, Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa agenda pembangunan daerah tetap berjalan pada koridor yang benar di masa transisi kepemimpinan. Rincian target kinerja tersebut secara lengkap tersaji dalam lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2025.

Sasaran, indikator kinerja dan target yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta anggarannya sebagaimana Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	32 %
2	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Nilai Kapabilitas APIP	3.010
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Risiko Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3.200
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkungan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan berpredikat SAKIP ≥ BB	76
5	Meningkatnya Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	90.50
6	Meningkatnya Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti	94.90
7	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center for Prevention (MCP)	92

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	20.347.262.065	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	940.611.700	DAU
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.500.669.562	DAU
	Jumlah	22.788.543.327	

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Perubahan)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP)	Nilai Kapabilitas APIP	3.005
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Risiko Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3.200
3	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal (APIP) dan Eksternal (BPK-RI)	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal	90.50
4	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal (APIP) dan Eksternal (BPK-RI)	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Eksternal	94.90
5	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi oleh APIP	Indeks Pencegahan Korupsi	95.2

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	13.953.321.832,50	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	586.420.000	DAU
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	924.809.779,50	DAU
	Jumlah	15.464.551.612	

Tabel 2.7

Perbandingan Perjanjian Kinerja Awal dengan Perubahan

No	Sasaran Strategis (Renstra Baru)	Indikator Kinerja	Satuan	PK AWAL 2025 (Mandat RPD)	PK PERUBAHAN 2025 (Renstra Baru)	Keterangan Perubahan
1	Meningkatnya Penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP)	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3,010	3,005	Penyesuaian Target Renstra 2025-2029
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Risiko Pemda	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	3,2	3,2	Target Tetap Konsisten
3	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan	Persentase	90,50%	90,50%	Redefinisi Sasaran/ Integrasi Sasaran Baru

No	Sasaran Strategis (Renstra Baru)	Indikator Kinerja	Satuan	PK AWAL 2025 (Mandat RPD)	PK PERUBAHAN 2025 (Renstra Baru)	Keterangan Perubahan
	Aparat Pengawas Internal (APIP) dan Eksternal (BPK-RI)	aparat pengawas Internal				
4	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal (APIP) dan Eksternal (BPK-RI)	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Eksternal	Persentase	94,90%	94,90%	Redefinisi Sasaran/ Integrasi Sasaran Baru
5	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi oleh APIP	Indeks Pencegahan Korupsi (MCP KPK)	Nilai	92	95,22	**Kenaikan Target Strategis**
6	Mandat Transisi Renstra (Hanya di PK Awal)	% Perangkat Daerah Berpredikat SAKIP ≥ BB	Persentase	76%	-	*Dihapus (Hanya ada di PK Mandat Awal) Sudah Tercapai pada PK Awal*
7	Mandat Transisi Renstra (Hanya di PK Awal)	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	Nilai	3,200	-	*Indikator Kinerja Sasaran Sudah tercapai pada PK Awal*

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi *planning* mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk. Fungsi *organizing* seluruh sumber daya dalam koridor prosedur yang telah ditetapkan yang menjadi dasar melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dan pembinaan sebagai fungsi *actuating* dari perencanaan yang sudah dibuat. Diakhir kegiatan terdapat fungsi *evaluating* dimana semua pelaksanaan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggungjawaban penggunaan seluruh sumberdaya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Pengukuran target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. kriteria ketercapaian sasaran strategis perangkat daerah dengan interval nilai capaian sebagai berikut :

No	Interval Nilai Capaian	Kriteria
1	≥ 91%	Tercapai
2	80% ≤ 90%	Tercapai dengan Catatan
3	< 80%	Tidak Tercapai

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 .1
Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	**Tujuan:** Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	Nilai Maturitas SPIP	Renstra 2024–2026	3,200	3,987*	112,5
2	**Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	Renstra 2024–2026	32%	32%	100
	Strategis 2: Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Renstra 2024–2026	3,010	3,69*	122%
	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas Pengendalian Risiko	Indeks Manajemen Risiko	Renstra 2024–2026	3,200	3,914*	122.31%
	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkungan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan berpredikat SAKIP ≥ BB	Renstra 2024–2026	76%	80%	105,26
	Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	Renstra 2024–2026	90,50%	86,99%	96.12%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Renstra 2024–2026	94,90%	95,43	100,55
	Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center For Prevention (MCP)	Renstra 2024–2026	92	14.2	15.43%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
3	**Tujuan :** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Renstra 2025–2029	3,200	3.199	99,66
4	**Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk	Nilai Kapabilitas APIP	Renstra 2025–2029	3,005	3,00**	99,89
	Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Renstra 2025–2029	3,200	3,194	99,81
	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal	Renstra 2025–2029	90,50%	91,51	101,11
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Renstra 2025–2029	94,90%	95,43	100.55
	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP	Indeks Pencegahan Korupsi daerah	Renstra 2025–2029	95,22	93	97.66

*) Hasil Penilaian Mandiri Tahun 2025
**) Hasil Penilaian Tahun 2024

Berdasarkan data realisasi kinerja tahun 2025, berikut adalah analisis mengenai pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk:

Analisis Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif, mayoritas indikator berhasil mencapai atau melampaui target yang ditetapkan dengan kriteria capaian diatas ≥90. Analisis ini menjelaskan capaian tersebut dalam dua perspektif perencanaan yang sedang berjalan secara transisi:

1. Keberlanjutan Mandat Renstra 2024–2026 (Awal tahun)

Tahun 2025 merupakan periode krusial di mana organisasi tetap mengawal indikator-indikator yang menjadi mandat dalam Renstra 2024–2026 dan pengendalian dan evaluasi atas dokumen perencanaan.

a. **Nilai Maturitas SPIP** Indikator dari Tujuan meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi: capaian kinerja triwulan III dalam pencapaian tujuan meningkatnya tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik melalui kualitas pengawasan dengan indikator Nilai Maturitas SPIP target Nilai tahun 2025 sebesar 3,200 realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2025 dalam tahap permohonan evaluasi atas penilaianmandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan nilai sebesar 3,987, karena statusnya masih penilaian mandiri, secara administratif masuk kategori **Tidak Tercapai (< 80%)** hingga ada verifikasi resmi.
b. **Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Sesuai Standar** merupakan indikator dari Sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggraan pemerintahan daerah yang akuntabel : **Realisasi Kinerja**: Tercapai, indikator ini mencapai realisasi sebesar **32%**, yang berarti tepat memenuhi **100% dari target** yang ditetapkan sebesar 32%.
    - Indikator ini merupakan **mandat murni dari Renstra 2024–2026**. Dalam dokumen Renstra 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja Perubahan, indikator spesifik dengan redaksi "Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standar" ini tidak dimunculkan kembali secara eksplisit karena sudah tercapai sebelum perjanjian kinerja perubahan dan renstra 2025-2029 disahkan. Perangkat daerah yang menerapkan SPIP tersebut adalah 16 perangkat Daerah yang telah melakukan penilaian mandiri SPIP dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP.
c. Nilai Kapabilitas APIP merupakan indikator dari sasaran Meningkatnya Kapabilitas APIP dengan Indikator: Sampai dengan triwulan III penilaian kapabilitas APIP dalam tahap permohonan evaluasi atas penilaian mandiri (*self assessment*), dari hasil penilaian mandiri diperoleh skor 3,69 dengan target 3,010 maka capaian berdasarkan hasil penilaian mandiri sebesar 122,31%

d. **Indeks Manajemen Risiko (Realisasi: 3,914*, Capaian 122,31%)**: Indikator ini merupakan salah satu tolok ukur dalam sasaran meningkatnya Kualitas Pengendalian Risiko.

   Sampai dengan triwulan III indeks manajemen resiko yang terintegrasi dalam penilaian SPIP dalam tahap permohonan evaluasi atas penilaian mandiri (*self assessment*), dari hasil penilaian mandiri diperoleh skor indkes manajemen risiko sebesar 3,69 dengan target 3,010 sehingga capaian sementara berdasarkan penilaian mandiri sebesar 122,31%.

e. **Persentase SAKIP ≥ BB (Realisasi: 80% dengan capaian 105,26%) Indikator atas Sasaran** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkungan Perangkat Daerah**:** Persentase Perangkat Daerah dengan predikat SAKIP ≥ BB melampaui target sebesar 80% dari target 76%, Keberhasilan melampaui target 76% kategori tercapai yang menunjukkan efektivitas pendampingan Inspektorat terhadap perangkat daerah dalam memperbaiki kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Indikator ini merupakan mandat murni dari dokumen perencanaan transisi (Renstra 2024-2026) dan tidak dicantumkan lagi dalam tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra 2025–2029 dikarenakan indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari perangkat daerah lain, yaitu: Sekretariat Daerah, nilai SAKIP secara administratif dan pembinaan manajemen kinerja perangkat daerah merupakan mandat utama dari Sekretariat Daerah.

f. **Sasaran Meningkatnya tindak lanjut Rekomendasi hasil Pengawasan :** Sampai dengan Triwulan III tahun 2025 baik indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti maupun persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti menunjukkan capaian diatas 90% masuk kategori tercapai, menunjukkan komitmen penyelesaian temuan pengawasan. Realisasi Indikator rekomendasi hasil pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti diperoleh dari jumlah rekomendasi selesai sebesar 6.760 dibagi dengan total rekomendasi 7.771 dikali 100 realisasi 86,99% dari target sebesar 90,50% sehingga capaian s.d Triwulan III sebesar 96,12%, sedangkan realisasi prosentase rekomendasi BPK diperoleh dari jumlah rekomendasi selesai sampai dengan semester I Tahun 2025 sebesar 751 dibagi jumlah rekomendasi sebesar 787 realisasi 95,43% deangan target sebesar 94,90% sehingga capaian sebesar 100,55%

g. **Indeks Pencegahan Korupsi (MCP)**: Realisasi s.d triwulan III sebesar 14,2 dari target nilai 92 sehingga capaian sebesar 15, 43% atau kurang dari **(< 80%)** masuk kategori **Tidak Tercapai.**

2. Capaian Tujuan dan Sasaran berdasarkan dokumen Perencanaan Strategis 2025–2029

Untuk menjamin kesinambungan dan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang baru, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk selanjutnya memedomani **Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029** yang ditetapkan pada tanggal 19 September 2025. Dokumen ini menjadi landasan strategis terkini dalam pengukuran kinerja instansi pada Triwulan IV Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 3.1 .1 Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan dokumen perencanaan renstra 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **Maturitas SPIP yang merupakan indikator tujuan atas** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi: Pada akhir tribulan IV tahun 2025 telah diperoleh nilai Hasil evaluasi SPIP oleh BPKP dengan nilai 3,199 sehingga dari target nilai renstra 2025-2029 sebesar 3,200 diperoleh capaian sebesar 99,66% (≥90) dapat dikatakan tercapai, menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas pengendalian internal.
b. **Nilai Kapabilitas APIP merupakan indikator atas Sasaran** meningkatnya penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk: Realisasi menggunakan Nilai tahun sebelumnya (tahun 2024) dengan nilai 3,00, sehingga capaiannya sebesar 99,83. Evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP tahun 2025 yang telah dilaksanakan ditunda dikarenakan ada perubahan pedoman penilaian kapabilitas APIP berdasarkan Surat Kepala BPKP pada tanggal 1 Desember 2025 Nomor HM.02.00/S-853/K/D4/2025 Hal Penyampaian Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/lembaga/pemerintah Daerah.
c. **Indeks Manajemen Risiko merupakan indikator dari sasaran** meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah : **dengan Realisasi sebesar 3,194, Capaian 99,81%,** Meskipun terdapat selisih dari target 3,200, capaian ini dikategorikan tercapai. Hal ini membuktikan bahwa perangkat daerah telah mampu memetakan dan memitigasi risiko strategis secara mandiri. Target Indeks Manajemen Risiko pada tahun 2025 tetap pada angka **3,200** di Renstra 2024-2026 maupun Renstra 2025-2029. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ini merupakan prioritas berkelanjutan yang dianggap krusial baik dalam masa transisi Renstra 2024-2026 maupun sebagai fondasi awal Renstra 2025-2029.
d. **Meningkatnya Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasa intern (APIP) dan eksternal (BPK-RI) :** Sampai TW IV tahun 2025 baik indikator

persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan persentase Penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan eksternal menunjukkan capaian diatas 90% masuk kategori tercapai, menunjukkan komitmen penyelesaian temuan pengawasan tetap dipertahankan. Realisasi Indikator persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawa internal APIP yang selesai ditindaklanjuti diperoleh dari jumlah rekomendasi selesai sebesar 7.304 dibagi dengan total rekomendasi 7.982 dikali 100 realisasi 91,51% dari target sebesar 90,50% sehingga capaian s.d akhir tahun 2025 sebesar 101,11%, sedangkan realisasi prosentase rekomendasi BPK sampai dengan akhir tahun masih berdasarkan prosentase dari jumlah rekomendasi selesai sampai dengan semester I Tahun 2025 sebesar 751 dibagi jumlah rekomendasi sebesar 787 realisasi 95,43% deangan target sebesar 94,90% sehingga capaian sebesar 100,55%

e. **Indeks Pencegahan Korupsi (MCP)**: dengan ditetapkannya Perbup Nomor 29 Tahun 2025 maka indeks pencegahan Korupsi yang pada awal tahun renstra 2024-2026 sebesar 92 ditingkatkan menjadi 95,22 pada dokumen renstra 2025-2029. Kenaikan ini bertujuan untuk mengakomodir target strategis baru yang menjadi prioritas Bupati terpilih dalam periode jangka menengah kedepan, khususnya pada efektivitas pencegahan korupsi. Realisasi indeks MCP sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar 93 menunjukkan bahwa secara faktual Inspektorat telah berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen transisi Renstra 2025-2029 dengan capaian 97,66%, diatas ≥ 90% dengan kategori tercapai. Namun, angka ini menjadi evaluasi penting bagi fondasi awal Renstra 2025-2029 karena masih terdapat selisih (gap) sebesar 2,22 poin untuk mencapai target ideal 95,22. Meskipun realisasi indeks sebesar 93 sudah sangat baik dan melampaui target Renstra 2024-2026, target dalam Renstra 2025–2029 sengaja dipasang lebih tinggi sebagai **"target tantangan"** guna memastikan penguatan integritas daerah berjalan lebih progresif di bawah kepemimpinan baru

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Kinerja pembangunan daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun (2024, 2023, 2022)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Dokumen	Target				Realisasi			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	**Tujuan :** Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Nilai Maturitas SPIP	Renstra 2024–2026 (Dalev Renstra)	-	-	3,190	3,200	-	3,169	3,190	3,987*
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	Maturitas SPIP	Renstra 2025-2029	-	-	-	3,200	-	-	-	3,199
2	**Sasaran 1 :** Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	Renstra 2024–2026	28%	32%	30%	32%	30%	36 %	32%	32%
3	**Sasaran 2:** Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Renstra 2024–2026 (Dalev Renstra)	-	-	3,000	3,010	3,00	3,000	3,000	3,69*
	Meningkatnya penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk		Renstra 2025-2029	-	-	-	3,005	-	-	-	3,00**
4	**Sasaran 3:** Meningkatnya kualitas Pengendalian Risiko	Indeks Manajemen Risiko	Renstra 2024–2026 (Dalev Renstra)	-	-	3,194	3,200	-	-	3,194	3,914*
	Meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah		Renstra 2025-2029	-	-	-	3,200	-	-	-	3,194
5	**Sasaran 4:** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah dengan	Renstra 2024–2026	-	-	74	76	-	-	-	80

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Dokumen	Target				Realisasi			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	Lingkungan Perangkat Daerah	berpredikat SAKIP ≥ BB	(Dalev Renstra)								
6	**Sasaran 5:** Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	Renstra 2024–2026 (Dalev Renstra)	-	-	90,41	90,50	-	-	90,41	86,99 %
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Renstra 2024–2026 (Dalev Renstra)	-	-	94,87	94,90	-	-	94,87	95,43
	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)	Persentase TLHP APIP	Renstra 2025-2029	-	-	-	90,50		-	-	91,51
		Persentase TLHP BPK	Renstra 2025-2029	-	-	-	94,90	-	-	-	95,43
7	**Sasaran 6:** Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center For Prevention (MCP)	Renstra 2024–2026 (Dalev Renstra)	-	-	95,21	92	-	-	95,21	14,2
	Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP	Indeks Pencegahan Korupsi daerah	Resntra 2025-2029	-	-	-	95,22	-	-	-	93

*) Hasil Penilaian Mandiri Tahun 2025
**) Hasil Penilaian Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.1.2 Secara umum, kinerja Inspektorat pada tahun 2025 menunjukkan tren stabilitas dan peningkatan pada beberapa indikator. Berikut adalah rinciannya:

1. **Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Berdasarkan Renstra 2024–2026 (Capaian s.d. Triwulan III)**

Berdasarkan pedoman Renstra 2024–2026, berikut adalah evaluasi kinerja per indikator yang membandingkan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya hingga periode berjalan:

a. **Indikator Tujuan Nilai Maturitas SPIP:** Tren menunjukkan peningkatan konsisten. Realisasi tahun 2024 mencapai **3,190** dari target **3,190** (100%). Pada data 2025 s.d triwulan III, nilai maturitas SPIP belum terbit sehingga realisasi di catat berdasarkan hasil penilaian mandiri maturitas SPIP yang telah dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP dengan nilai **3,987***.

b. **Indikator Sasaran Persentase Perangkat Daerah Menerapkan SPIP sesuai strandar:** Pada tahun 2024, realisasi tercatat sebesar **32%**, yang telah memenuhi target tahun tersebut. Memasuki tahun 2025, realisasi tetap terjaga di angka **32%** sesuai dengan target yang ditetapkan.

c. **Nilai Kapabilitas APIP:** Kapabilitas APIP stagnan di angka **3,000** pada periode 2023-2024. Namun, terdapat proyeksi/capaian sebesar **3,69*** pada tahun 2025 yang merupakan hasil penilaian mandiri, yang berarti telah melampaui target awal sebesar **3,010**.

d. **Indeks Manajemen Risiko:** Realisasi pada tahun 2024 berada pada angka **3,194**, tepat sesuai target. pada tahun 2025 di Triwulan III, dilaksanakan penilaian mandiri dengan nilai **3,914*** dari target **3,200**. Nilai tersebut merupakan nilai hasil penilaian mandiri, yang belum bersifat final.

e. **Akuntabilitas Kinerja (SAKIP ≥ BB):** pada tahun 2025 dengan realisasi mencapai **80%** perangkat daerah berpredikat minimal BB, melampaui target yang ditetapkan sebesar **76%**.

f. **Tindak Lanjut Rekomendasi (TLHP):**

- **APIP:** Terjadi penurunan performa pada tahun 2025 di Triwulan III dengan realisasi **86,99%** , di bawah capaian tahun 2024 (**90,41%**) dan di bawah target 2025 (**90,50%**).
- **BPK:** Realisasi tahun 2025 pada triwulan III mencapai **95,43%**, menunjukkan tren positif dibandingkan tahun 2024 (**94,87%**) dan berhasil melampaui target **94,90%**.

g. **Indeks Pencegahan Korupsi (MCP):** Indikator ini menunjukkan anomali atau penurunan drastis pada catatan 2025 triwulan III dengan angka **14,2** dari target **92**, jauh di bawah realisasi tahun 2024 yang mencapai **95,21**.

2. Analisis Berdasarkan Renstra 2025–2029 (Capaian Periode Akhir TW IV)

Berdasarkan transisi ke Renstra 2025-2029, capaian kinerja diukur untuk memastikan keselarasan dengan target jangka panjang yang baru:

a. Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi dengan Indikator Maturitas SPIP Terintegrasi: Realisasi akhir triwulan IV Tahun 2025 mencapai 3,199, hanya selisih tipis (0,001) dari target yang ditetapkan sebesar 3,200.

b. Sasaran Meningkatnya penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk dengan indikator Nilai Kapabilitas APIP: Realisasi kapabilitas APIP sampai dengan akhir tribulan IV berada pada angka 3,00** yang diperoleh dari hasil penilaian tahun 2024, menunjukkan pemenuhan standar dasar dari target yang ditetapkan sebesar 3,005.

c. Sasaran meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah dengan indikator Indeks manajemen Risiko: Capaian akhir TW IV adalah 3,194, sedikit di bawah target awal Renstra baru yaitu 3,200.

d. Sasaran Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI) Penyelesaian Tindak Lanjut (TLHP) dengan indikator sebagai berikut:

   - Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal: menunjukkan performa yang baik di angka 91,51%, berhasil melampaui target 90,50% dan lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya.
   - Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal: Mencapai realisasi 95,43%, yang secara konsisten memenuhi target 94,90% yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029.

e. Sasaran Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP dengan indikator Indeks Pencegahan Korupsi daerah: Indeks pencegahan korupsi daerah tercatat sebesar 93, yang menunjukkan performa kuat meskipun sedikit di bawah target resntra 2025-2029 sebesar 95,22.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Tabel 3.1.3.1
Target Kinerja Renstra (berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2025 - Renstra 2025-2029	Target Renstra 2025					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Tujuan :** Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	Nilai Maturitas SPIP	Renstra 2024–2026	3,190	3,200	3,210			
2	**Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	Renstra 2024–2026	30%	32%	32%			
	Strategis 2: Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Renstra 2024–2026	3,000	3,010	3,210			
	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas Pengendalian Risiko	Indeks Manajemen Risiko	Renstra 2024–2026	3,194	3,200	3,210			
	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkungan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan berpredikat SAKIP ≥ BB	Renstra 2024–2026	74%	76%	78%			
	Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	Renstra 2024–2026	90,41%	90,50%	91%			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2025 - Renstra 2025-2029	Target Renstra 2025					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Renstra 2024–2026	94,87%	94,90%	94,95%			
	Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center For Prevention (MCP)	Renstra 2024–2026	95,21	92	92			
3	**Tujuan :** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Renstra 2025–2029	3,19	3,200	3,21	3,23	3,25	3,26
4	**Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk	Nilai Kapabilitas APIP	Renstra 2025–2029	3,00	3,005	3,01	3,015	3,02	3,025
	Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Renstra 2025–2029	3,194	3,200	3,21	3,22	3,225	3,23
	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal	Renstra 2025–2029	90,41	90,50%	91	91,5	91,75	92

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2025 - Renstra 2025-2029	Target Renstra 2025					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Renstra 2025–2029	94,87	94,90	95,95	94,98	95,05	95,07
	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP	Indeks Pencegahan Korupsi daerah	Renstra 2025–2029	95,21	95,22	95,24	95,26	95,28	95,3

Tabel 3.1.3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target Akhir Renstra - Renstra 2024- 2026 - Renstra 2025-2029	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	**Tujuan :** Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	Nilai Maturitas SPIP	Renstra 2024–2026	3,210	3,987*	124,20*
2	**Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	Renstra 2024–2026	32%	32%	100,00
	Strategis 2: Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Renstra 2024–2026	3,020	3.69*	122,19
	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas Pengendalian Risiko	Indeks Manajemen Risiko	Renstra 2024–2026	3,210	3.914*	121,93*
	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkungan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan berpredikat SAKIP ≥ BB	Renstra 2024–2026	78%	80%	102,56
	Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	Renstra 2024–2026	91%	86,99	95,59
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Renstra 2024–2026	94,95%	95,43	100,51
	Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi dan	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center For	Renstra 2024–2026	92	14,2	15,43

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target Akhir Renstra - Renstra 2024- 2026 - Renstra 2025-2029	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Penegakan Integritas	Prevention (MCP)				
3	**Tujuan :** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Renstra 2025–2029 (Baseline)	3,27	3.199	97,83
4	**Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk	Nilai Kapabilitas APIP	Renstra 2025–2029 (Baseline)	3,03	3,00**	99,09
	Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Renstra 2025–2029 (Baseline)	3,235	3,194	98,73
	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal	Renstra 2025–2029 (Baseline)	92,5	91,51	98,93
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Renstra 2025–2029 (Baseline)	95,07%	95,43	100,37
	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP	Indeks Pencegahan Korupsi daerah	Renstra 2025–2029 (Baseline)	95,32	93	97,56

*) Hasil Penilaian Mandiri Tahun 2025

**) Hasil Penilaian Tahun 2024

Analisis ini memotret tingkat kemajuan capaian indikator kinerja berdasarkan dua dokumen perencanaan, yakni Renstra 2024–2026 (capaian Triwulan III) dan Renstra 2025–2029 (kondisi akhir Triwulan IV).

1. Capaian Berdasarkan Renstra 2024–2026 (Kondisi Triwulan III)

Berdasarkan target akhir yang ditetapkan dalam Renstra 2024–2026, mayoritas indikator menunjukkan tingkat kemajuan yang sangat tinggi, dengan beberapa di antaranya telah melampaui target:

a) **Tujuan Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi** dengan indikator Nilai Maturitas APIP**:** Nilai Maturitas SPIP mencapai **3,987*** dari target 3,210 (tingkat kemajuan 124,20%) nilai tersebut cukup tinggi karena merupakan hasil penilaian mandiri sehingga belum cukup tepat untuk menggambarkan tingkat kemajuan yang sesungguhnya.

b) **Sasaran meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggraan pemerintahan daerah yang akuntabel** dengan Indikator persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standar telah mencapai target akhir periode renstra **100%** dengan realisasi sebesar **32%**.

c) **Sasaran meningkatnya Kapabilitas APIP** dengan Indikator Kapabilitas APIP**:** Indikator Nilai Kapabilitas APIP menunjukkan performa luar biasa dengan realisasi **3,69***, melampaui target **3,020** dengan tingkat kemajuan mencapai **122,19%***.Namun sebenarnya nilai ini belum bisa diakui karena merupakan hasil dari penilaian mandiri.

d) **Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkungan Perangkat Daerah** dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah dengan berpredikat SAKIP ≥ BB telah melampaui target akhir renstra, yakni mencapai **80%** dari target **78%** (**102,56%**) tercapai.

e) **Sasaran Meningkatnya kualitas Pengendalian Risiko** dengan Indikator Indeks manajemen Risiko : Indeks Manajemen Risiko berada pada angka 3,914* (121,93% dari target). Namun perlu mendapat perhatian bahwa nilai tersebut merupakah hasil penilaian mandiri masih merupakan klaim dari pemerintah daerah belum mendapat evaluai pengakuan oleh BPKP selaku tim evaluator.

f) **Sasaran Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan** dengan Indikator **:** Realisasi tindak lanjut hasil pengawasan APIP (**86,99%**) dan BPK (**95,43%**), hasil pengawasan APIP s.d Triwulan III Jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra 2024-2026 mencapai tingkat kemajuan sebesar 95,59%, sedangkan tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK telah melampaui target akhir periode Renstra 2024-2026 dengan capaian di atas **100,51%**.

g) **Sasaran Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas** dengan Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (MCP) Jika dikomparasikan dengan target Akhir tahun renstra 2024–2026 yang ditetapkan sebesar **92**, maka tingkat kemajuan kinerja mencapai **15,43%**. Nilai capaian progres yang rendah pada akhir triwulan III menunjukkan bahwa intervensi pencegahan korupsi perlu dilakukan akseleratif sebelum tahun anggaran 2025 berakhir.

2. Capaian Berdasarkan Renstra 2025–2029 (Kondisi Akhir Triwulan IV)

Evaluasi target akhir periode Renstra 2025–2029 terhadap realisasi sampai dengan akhir Triwulan IV 2025 menunjukkan gambaran kesiapan pemerintah daerah dalam memasuki periode perencanaan baru:

a. Tujuan meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi dengan indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) **:** Realisasi akhir tahun 2025 sebesar **3,199** memberikan tingkat kemajuan sebesar **97,83%** terhadap target akhir Renstra 2025-2029 sebesar **3,27**.

b. Sasaran meningkatnya penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk dengan Indikator Nilai Kapabilitas APIP: sampai dengan akhir tahun 2025 Kapabilitas APIP belum dilakukan evaluasi oleh BPKP sehingga menggunakan realisasi tahun 2024 sebesar 3,00 jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra 2025-2029 maka progress kemajuan capaian sebesar 99,09%.

c. Sasaran meningkatnya kualitas Pengendalian Risiko dengan Indikator Indeks manajemen Risiko : Indeks Manajemen Risiko dengan realisasi 3,194 pada akhir triwulan IV 2025 dari target akhir periode renstra 2025-2029 sebesar 3,235 sehingga capaian progress sebesar **98,73%**. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif dan prosedural, manajemen risiko sudah berjalan hampir sempurna, namun mungkin masih memerlukan penguatan pada sisi implementasi mitigasi risiko yang lebih berdampak pada efisiensi anggaran atau efektivitas pelayanan publik.

d. Sasaran meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI) dengan indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal : Untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK) sudah melampaui target baseline dengan capaian **100,37%**, sedangkan penyelesaian internal

(APIP) berada pada angka **98,93%**. keduanya telah melampaui target akhir periode Renstra 2024-2026 dengan capaian di atas **90%**.

e. Sasaran Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP dengan Indikator Indeks Pencegahan Korupsi daerah : Indeks Pencegahan Korupsi pada akhir triwulan IV Tahun 2025 tercatat sebesar 93 dari target baseline renstra 2025-2029 sebesar 95,32, menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 97,56%.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional

Dalam rangka melakukan evaluasi dan sebagai pembanding dalam upaya pencapaian target indikator tujuan dan Sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk. Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2025 dengan Standart Nasional sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Dengan Standard Nasional (berdasarkan Renstra 2024-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional/ Provinsi	Realisasi 2025	Posisi Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	**Tujuan :** Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	Nilai Maturitas SPIP	-	3,987*	-
2	**Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	-	32%	-
	Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	-	3.69*	-
	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas Pengendalian Risiko	Indeks Manajemen Risiko	3,006	3.914*	diatas
	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkungan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan berpredikat SAKIP ≥ BB	-	80%	-
	Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	-	86,99	-
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	97,92	95,43	Dibawah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional/ Provinsi	Realisasi 2025	Posisi Kinerja
1	2	3	4	5	6
	Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center For Prevention (MCP)	73,22	14,2	dibawah

Tabel 3.1.4.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Dengan Standard Nasional (berdasarkan Renstra 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional/ Provinsi	Realisasi 2025	Posisi Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	**Tujuan :** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,070	3,199	diatas
2	**Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk	Nilai Kapabilitas APIP	-	3,00**	-
3	**Sasaran Strategis 2:** Meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,006	3,194	diatas
4	**Sasaran Strategis 3:** Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal	-	91,51%	-
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	97,92	95,43%	dibawah
5	**Sasaran Strategis 4:** Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP	Indeks Pencegahan Korupsi daerah	92	93	diatas

Berdasarkan tabel 3.1.4. indikator tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 memiliki kesamaan definisi operasional, hanya terdapat perbedaan dalam narasi yang digunakan, dari kedua dokumen perencanaan tersebut, realisasi atas kinerja tujuan dan sasaran tahun 2025 jika dibandingkan dengan standar nasional dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. **Tujuan :** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi dengan Indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

- **Kinerja terhadap Standar:** Realisasi Maturitas SPIP s.d Triwulan III Tahun 2025 masih dalam tahap penilaian mandiri dengan skor 3,987 belum dapat dibandingkan dengan kabupaten sekitar maupun nasional dikarenakan belum ada realist nilai SPIP, Pada akhir triwulan IV tahun 2025 terealisasi sebesar 3,199. Angka ini berada di atas standar nasional/provinsi yang ditetapkan sebesar 3,070.
- **Analisis Komparatif:** Capaian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal Nganjuk telah melampaui ambang batas rata-rata nasional. Jika dibandingkan dengan Kota Surabaya yang menjadi barometer di Jawa Timur, posisi Nganjuk yang berada di level 3 (Terdefinisi) dengan nilai mendekati 3,200 menunjukkan kematangan sistem yang stabil dalam menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. **Sasaran Strategis:** Meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah dengan Indikator Manajemen Risiko Indeks (MRI)
    - **Kinerja terhadap Standar:** Indeks Manajemen Risiko Nganjuk mencatatkan nilai 3,914 berdasarkan penilaian mandiri pada triwulan III 2025 dan terealisasi 3,194 pada akhir tahun 2025 berdasarkan evaluasi BPKP. Realisasi ini menempatkan Nganjuk pada posisi di atas standar nasional sebesar 3,006 pada Akhir Triwulan IV 2025.
    - **Analisis Komparatif:** Melampaui standar nasional MRI membuktikan bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki mitigasi risiko yang lebih terukur dibandingkan banyak daerah lain. Meskipun Kota Surabaya unggul, skor 3,194 merupakan modal kuat Kabupaten Nganjuk untuk bersaing di level Provinsi Jawa Timur dalam hal ketahanan organisasi terhadap risiko strategis.
3. **Sasaran Strategis :** Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI) dengan indikator **Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK**
    - **Kinerja terhadap Standar:** Realisasi penyelesaian rekomendasi BPK mencapai 95,43% pada tribulan III 2025 dan sampai dengan akhir tahun 2025. Namun, angka ini masih berada di bawah standar nasional/provinsi yang sangat tinggi, yaitu 97,92%.
    - **Analisis Komparatif:** Walaupun secara internal Kabupaten Nganjuk telah melampaui target Renstra 2024-2026 (94,95%), namun jika dibandingkan dengan standar rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 97,92%, Nganjuk masih memiliki selisih sekitar 2,49%. Kota Surabaya dan beberapa daerah di Jawa Timur dikenal memiliki kecepatan tindak lanjut yang sangat

agresif, sehingga Nganjuk perlu mengakselerasi penyelesaian temuan-temuan lama agar dapat sejajar dengan standar tertinggi di Jawa Timur. namun patut dibanggakan karena Nganjuk berada pada peringkat 5 sejawa timur dalam capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

4. **Sasaran Strategis :** Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP dengan Indikator Indeks Pencegahan Korupsi (MCP KPK)

- Kinerja terhadap Standar: Indeks MCP Nganjuk pada Akhir triwulan III tahun 2025 mencapai 14,2 (berdasarkan standar Renstra 2024-2026). Posisi ini berada di bawah standar nasional/provinsi yang berada di angka 73,22.
- Kinerja terhadap Standar: Indeks MCP Nganjuk pada Akhir triwulan IV tahun 2025 mencapai 93,0 (berdasarkan standar Renstra 2025-2029). Posisi ini berada di atas standar nasional/provinsi yang berada di angka 92,0
- Analisis Komparatif: Keberhasilan meraih skor 93,0 pada akhir triwulan IV Tahun 2025 menempatkan Nganjuk dalam zona hijau (sangat baik) secara nasional. Dalam konteks regional, angka ini kompetitif dengan Kota Surabaya. Capaian ini mencerminkan keberhasilan APIP dalam mengawal delapan area intervensi pencegahan korupsi, mulai dari perencanaan anggaran hingga pengawasan dana desa, sehingga melampaui ekspektasi standar nasional.

Secara umum, mayoritas indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 telah berada di atas standar nasional pada akhir triwulan IV Tahun 2025 , terutama pada aspek Maturitas SPIP, MRI, dan MCP. Fokus utama perbaikan ke depan adalah pada indikator TLHP BPK, di mana meskipun realisasinya tercapai sangat tinggi (95,43%), standar yang ditetapkan di level Jawa Timur jauh lebih kompetitif (97,92%). Hal ini menuntut koordinasi yang lebih intensif antar perangkat daerah untuk mencapai status *"Zero Findings*" atau penyelesaian 100%.

Gambar. Perbandingan Capaian Indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan MRI Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dengan standar Nasional (Kota Surabaya)

No. Urut	Kode Pw	No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi 2025							
				SPIP		MR		IEPK		Status Terdefinis	Keterangan Evaluasi
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level		
212	PW13	5	Kabupaten Jombang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
213	PW13	6	Kabupaten Lumajang	3.150	3	3.105	3	2.676	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
214	PW13	7	Kabupaten Pacitan	2.772	2	2.731	2	2.670	2	Tidak	Panel Kedeputian
215	PW13	8	Kabupaten Pasuruan	3.032	3	2.961	2	2.724	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
216	PW13	9	Kabupaten Ponorogo	2.821	2	2.693	2	2.158	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
217	PW13	10	Kabupaten Probolinggo	2.524	2	2.030	2	1.616	1	Tidak	Panel Kedeputian
218	PW13	11	Kabupaten Tulungagung	2.929	2	2.791	2	2.670	2	Tidak	Panel Kedeputian
219	PW13	12	Kota Blitar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
220	PW13	13	Kota Mojokerto	3.257	3	3.152	3	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
221	PW13	14	Kota Malang	3.068	3	3.031	3	2.766	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
222	PW13	15	Kabupaten Blitar	3.287	3	2.978	2	2.524	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
223	PW13	16	Kabupaten Lamongan	2.935	2	2.741	2	2.802	2	Tidak	Panel Kedeputian
224	PW13	17	Kabupaten Situbondo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
225	PW13	18	Kota Probolinggo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
226	PW13	19	Kota Kediri	2.964	2	2.881	2	2.646	2	Tidak	Panel Kedeputian
227	PW13	20	Kabupaten Gresik	3.343	3	2.997	2	2.430	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
228	PW13	21	Kabupaten Kediri	2.882	2	2.570	2	2.592	2	Tidak	Panel Kedeputian
229	PW13	22	Kabupaten Sidoarjo	3.265	3	2.952	2	2.724	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
230	PW13	23	Kabupaten Pamekasan	3.046	3	3.041	3	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
231	PW13	24	Kabupaten Sumenep	3.127	3	3.028	3	2.464	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
232	PW13	25	Kota Madiun	3.289	3	3.063	3	2.736	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
233	PW13	26	Kabupaten Magetan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
234	PW13	27	Kabupaten Trenggalek	3.101	3	2.809	2	2.502	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
235	PW13	28	Kabupaten Ngawi	3.240	3	3.156	3	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
236	PW13	29	Kabupaten Tuban	3.200	3	2.995	2	2.964	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
237	PW13	30	Kabupaten Madiun	3.290	3	3.073	3	2.706	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
238	PW13	31	Kota Pasuruan	3.167	3	3.028	3	2.670	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
239	PW13	32	Kota Batu	3.178	3	3.069	3	2.482	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
240	PW13	33	Kabupaten Nganjuk	3.199	3	3.194	3	2.918	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
241	PW13	34	Kabupaten Jember	3.008	3	2.813	2	2.580	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
242	PW13	35	Kabupaten Sampang	3.219	3	3.056	3	2.970	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
243	PW13	36	Kabupaten Mojokerto	3.245	3	3.125	3	2.984	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
244	PW13	37	Kabupaten Malang	3.175	3	3.169	3	2.080	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
245	PW13	38	Kabupaten Bangkalan	3.130	3	2.925	2	2.340	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur,13120
Telepon 021-85910031 (hunting) Faksimile 021-85910302

Nomor : PE.09.04/S-456/D4/04/2025 30 Desember 2025
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025

Yth. Para Kepala Perwakilan BPKP
di Tempat

Memperhatikan surat kami nomor PE.09.02/ST-253/D404/01/2025 tanggal 14 Oktober 2025, hal Ekspose Panel Kedeputian atas Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Pemerintah Daerah Tahap I Tahun 2025 dan nomor PE.09.02/ST-255/D404/01/2025 tanggal 15 Oktober 2025 hal Ekspose Panel Kedeputian atas Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Pemerintah Daerah Tahap II Tahun 2025, bersama ini kami menyampaikan penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi 2025, dengan karakteristik terdefinisi sebagai berikut:

No	Nama Pemda	Hasil Evaluasi/Panel SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi *)		
		SPIP	MRI	IEPK
1	Kota Surabaya	3.070	3.006	3.112
2	Kota Denpasar	3.000	3.000	3.000

* SPIP Terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi mensyaratkan SPIP, MRI dan IEPK masing-masing minimal level 3.
Sumber: diolah dari data hasil evaluasi BPKP Tahun 2025

Adapun rincian pemerintah daerah yang dievaluasi sebagaimana kami lampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini.

Untuk selanjutnya agar Kepala Perwakilan dapat menerbitkan laporan Hasil Evaluasi pada masing-masing pemerintah daerah. Rincian skor dan level masing-masing pemerintah daerah tersaji dalam lampiran.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Deputi,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Setya Nugraha

Tembusan Yth.:
1. Kepala BPKP (sebagai laporan)
2. Wakil Kepala BPKP (sebagai laporan)
3. Sekretaris Utama dan Para Deputi BPKP selaku Pembina

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Gambar. Perbandingan Capaian Indikator MCP KPK dengan standar Nasional (Kota Surabaya dan Kabupaten sekitar)

MCSP KPK Tahun 2025

Capaian MCSP KPK Tahun 2025 hasil QA per tanggal 2 Januari 2026, Kabupaten Nganjuk memperoleh nilai 92,7 atau Indeks 93 yang berada di peringkat 7 se-Jawa Timur dan peringkat 25 Nasional.

No	Nama Instansi	Indeks
3	Pemerintah Kota Mojokerto	96
4	Pemerintah Kabupaten Pacitan	95
7	Pemerintah Kota Surabaya	95
17	Pemerintah Kota Madiun	94
18	Pemerintah Kabupaten Lumajang	94
23	Pemerintah Kabupaten Madiun	93
25	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	93
27	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	92
29	Pemerintah Kabupaten Jombang	92
32	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	92
38	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	92
42	Pemerintah Kabupaten Malang	91
43	Pemerintah Kabupaten Lamongan	91
52	Pemerintah Kota Batu	91
54	Pemerintah Kota Blitar	91
68	Pemerintah Kabupaten Kediri	90
75	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	90
76	Pemerintah Kabupaten Gresik	90
78	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	90
82	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	89
87	Pemerintah Kabupaten Sumenep	89
96	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	89
101	Pemerintah Kabupaten Ngawi	89
103	Pemerintah Kota Malang	88
108	Pemerintah Kota Probolinggo	88

Progress Pelaporan dan Verifikasi MCSP 2025

October 10 2025, 10:17:29 WIB

NO	PEMERINTAH DAERAH	SCORE	Σ DOKUMEN BELUM DIUNGGAH
1	Pemkot Mojokerto	73,22	217
2	Pemkab Madiun	65,40	251
3	Pemkab Jombang	64,64	221
4	Pemkot Blitar	62,23	273
5	Pemkot Surabaya	61,11	268
6	Pemkab Mojokerto	59,17	257
7	Pemkab Sumenep	59,11	312
8	Pemkab Tulungagung	58,14	310
9	Pemkab Lamongan	57,70	313
10	Pemkab Ngawi	57,70	300
11	Pemkot Pasuruan	57,55	344
12	Pemkab Ponorogo	55,88	317
13	Pemkot Probolinggo	54,82	346
14	Pemkab Gresik	54,67	232
15	Pemkab Situbondo	53,35	342
16	Pemkab Magetan	52,95	279
17	Pemkab Sidoarjo	51,45	374
18	Pemkab Bojonegoro	50,72	300
19	Pemkab Banyuwangi	49,67	372
20	Pemkab Pacitan	49,40	348
21	Pemkab Jember	47,69	371
22	Pemkab Pasuruan	42,86	314
23	Pemkab Pamekasan	41,65	408
24	Pemkab Bondowoso	40,62	333
25	Pemprov Jawa Timur	40,26	324
26	Pemkab Blitar	39,95	468
27	Pemkot Madiun	39,41	462
28	Pemkab Kediri	38,33	378
29	Pemkab Malang	37,66	463
30	Pemkot Batu	36,64	388
31	Pemkab Trenggalek	36,11	411
32	Pemkab Sampang	33,36	436
33	Pemkot Kediri	32,82	389
34	Pemkab Bangkalan	32,77	309
35	Pemkot Malang	32,02	459
36	Pemkab Probolinggo	29,45	458
37	Pemkab Lumajang	28,25	422
38	Pemkab Tuban	27,95	494
39	Pemkab Nganjuk	14,20	548

Gambar. Perbandingan Capaian Indikator Indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dengan standar Nasional (Kota Surabaya)

Entitas		Temuan			Rekomendasi			Status Pemantauan Tindak Lanjut																Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/Daerah		Tingkat Penyelesaian TLRHP (%)
								Sesuai dengan Rekomendasi				Belum Sesuai dengan Rekomendasi				Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti							
No	Periode	Jml		Nilai	Jml		Nilai	Jml	%		Nilai	Jml	%		Nilai	Jml	%		Nilai	Jml	%		Nilai			
	2010-2014	**72**	**IDR**	**6.154.173.627,77**	**158**	**IDR**	**4.027.320.298,44**	**158**	**100**	**IDR**	**4.027.320.298,44**	**0**	**0**	**IDR**	**0,00**	**0**	**0**	**IDR**	**0,00**	**0**	**0**	**IDR**	**0,00**	**IDR**	**4.062.293.537,35**	**100**
	2010	19	IDR	1.700.021.260,77	39	IDR	1.639.552.295,54	39	100	IDR	1.639.552.295,54	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	IDR	1.673.196.274,42	100
	2011	24	IDR	2.212.235.564,00	57	IDR	193.310.395,00	57	100	IDR	193.310.395,00	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	IDR	193.310.395,00	100
	2012	7			16			16	100			0	0			0	0			0	0					100
	2013	16	IDR	2.241.916.803,00	29	IDR	2.194.457.607,90	29	100	IDR	2.194.457.607,90	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	IDR	2.195.786.867,93	100
	2014	6			17			17	100			0	0			0	0			0	0					100
	2015-2019	**72**	**IDR**	**13.140.993.632,63**	**181**	**IDR**	**12.849.973.032,17**	**175**	**96,69**	**IDR**	**9.807.946.270,66**	**6**	**3,31**	**IDR**	**3.042.026.761,51**	**0**	**0**	**IDR**	**0,00**	**0**	**0**	**IDR**	**0,00**	**IDR**	**10.080.095.273,81**	**96,69**
	2015	10	IDR	788.803.143,69	25	IDR	788.803.143,69	25	100	IDR	788.803.143,69	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	IDR	788.803.143,69	100
	2016	29	IDR	5.696.194.802,49	80	IDR	5.696.194.802,49	77	96,25	IDR	2.678.168.040,98	3	3,75	IDR	3.018.026.761,51	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	IDR	2.678.168.040,98	96,25
	2017	13	IDR	3.544.359.994,95	27	IDR	3.544.359.994,95	27	100	IDR	3.544.359.994,95	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	IDR	3.544.359.994,95	100
	2018	7	IDR	984.694.107,95	19	IDR	984.694.107,95	19	100	IDR	984.694.107,95	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	IDR	996.716.911,84	100
	2019	13	IDR	2.126.941.583,55	30	IDR	1.835.920.983,09	27	90	IDR	1.811.920.983,09	3	10	IDR	24.000.000,00	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	IDR	2.072.047.182,35	90
	2020-2024	**58**	**IDR**	**4.838.168.691,99**	**156**	**IDR**	**2.718.751.166,66**	**125**	**80,13**	**IDR**	**2.662.447.770,81**	**31**	**19,87**	**IDR**	**56.303.395,84**	**0**	**0**	**IDR**	**0,00**	**0**	**0**	**IDR**	**0,00**	**IDR**	**3.676.168.279,89**	**80,13**
	2020	8	IDR	737.827.499,99	24	IDR	737.827.499,99	24	100	IDR	737.827.499,99	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	IDR	737.827.499,99	100
	2021	9	IDR	564.674.321,01	18	IDR	564.674.321,01	15	83,33	IDR	564.674.321,01	3	16,67	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	IDR	564.677.459,75	83,33
	2022	9	IDR	1.688.549.531,14	20	IDR	15.000.000,00	20	100	IDR	15.000.000,00	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	IDR	581.309.131,14	100
	2023	22	IDR	1.381.609.935,66	62	IDR	1.374.834.975,66	46	74,19	IDR	1.322.445.949,82	16	25,81	IDR	52.389.025,84	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	IDR	1.330.761.154,82	74,19
	2024	10	IDR	465.507.404,19	32	IDR	26.414.370,00	20	62,5	IDR	22.500.000,00	12	37,5	IDR	3.914.370,00	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	IDR	461.593.034,19	62,5
376	**Pemerintah Kota Surabaya**	**526**	**IDR**	**84.069.884.064,93**	**1.159**	**IDR**	**58.314.366.996,08**	**1.135**	**97,93**	**IDR**	**45.490.692.065,22**	**16**	**1,38**	**IDR**	**11.877.927.924,86**	**0**	**0**	**IDR**	**0,00**	**8**	**1**	**IDR**	**945.747.006,00**	**IDR**	**50.673.185.383,47**	**98,62**
	2005-2009	**177**	**IDR**	**14.578.484.956,47**	**302**	**IDR**	**9.245.092.217,32**	**295**	**97,69**	**IDR**	**8.318.726.236,46**	**3**	**0,99**	**IDR**	**775.542.139,86**	**0**	**0**	**IDR**	**0,00**	**4**	**1**	**IDR**	**150.823.841,00**	**IDR**	**9.205.006.964,50**	**99,01**
	2005	31	IDR	2.741.895.894,55	53	IDR	2.493.262.097,55	50	94,34	IDR	2.362.813.747,55	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	3	6	IDR	130.448.350,00	IDR	1.547.920.034,05	100
	2006	28	IDR	6.025.204.446,64	43	IDR	6.025.204.446,64	40	93,02	IDR	5.277.328.955,64	2	4,65	IDR	727.500.000,00	0	0	IDR	0,00	1	2	IDR	20.375.491,00	IDR	5.277.328.955,64	95,35
	2007	23	IDR	94.473.450,00	29	IDR	0,00	29	100	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	IDR	94.473.450,00	100
	2008	52	IDR	977.453.971,19	104	IDR	28.560.718,00	104	100	IDR	28.560.718,00	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	IDR	983.389.361,11	100
	2009	43	IDR	4.739.457.194,09	73	IDR	698.064.955,13	72	98,63	IDR	650.022.815,27	1	1,37	IDR	48.042.139,86	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	IDR	1.301.895.163,70	98,63
	2010-2014	**171**	**IDR**	**30.109.417.345,51**	**405**	**IDR**	**18.172.857.310,04**	**398**	**98,27**	**IDR**	**16.459.926.049,50**	**3**	**0,74**	**IDR**	**918.008.095,54**	**0**	**0**	**IDR**	**0,00**	**4**	**1**	**IDR**	**794.923.165,00**	**IDR**	**16.939.473.403,10**	**99,26**
	2010	80	IDR	11.157.276.276,19	173	IDR	3.581.823.778,00	169	97,69	IDR	2.793.040.628,00	1	0,58	IDR	59.043.150,00	0	0	IDR	0,00	3	2	IDR	729.740.000,00	IDR	4.428.716.893,60	99,42
	2011	15	IDR	1.622.009.683,28	35	IDR	1.446.721.116,00	35	100	IDR	1.446.721.116,00	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	IDR	1.446.721.116,00	100
	2012	38	IDR	7.823.004.693,50	73	IDR	3.637.185.723,50	73	100	IDR	3.637.185.723,50	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	IDR	2.380.764.611,50	100
	2013	18	IDR	3.404.732.001,00	82	IDR	3.404.732.001,00	81	98,78	IDR	3.404.732.001,00	1	1,22	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	0	0	IDR	0,00	IDR	3.503.974.201,00	98,78
350	**Pemerintah Kabupaten Nganjuk**	**344**	**IDR**	**44.990.696.457,17**	**760**	**IDR**	**38.957.450.561,93**	**737**	**96,97**	**IDR**	**33.478.234.024,74**	**23**	**3,03**	**IDR**	**5.479.216.537,19**	**0**	**0**	**IDR**	**0,00**	**0**	**0**	**IDR**	**0,00**	**IDR**	**36.145.937.167,86**	**96,97**

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakuka

Tabel 3.1.5
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung	Alternatif Soluasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Tujuan:** Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	Nilai Maturitas SPIP	Renstra 2024–2026	3,200	3.987*	124,59	Komitmen pimpinan dalam mengimplementasikan elemen SPIP secara konsisten di seluruh lini organisasi.	Melakukan evaluasi mandiri (Self-Assessment) secara berkala untuk mencapai target yang ditetapkan
2	**Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	Renstra 2024–2026	32%	32%	100	Seluruh Perangkat Daerah (PD) telah memenuhi kewajiban administratif dan substansi pengendalian intern.	Menjaga konsistensi penerapan standar SPIP melalui bimbingan teknis berkelanjutan bagi admin/operator PD.
	Strategis 2: Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Renstra 2024–2026	3,010	3.69*	122,59*	Realisasi secara angka melampaui target, namun status formal masih dalam proses evaluasi BPKP dengan pedoman baru.	Melakukan koordinasi intensif dengan BPKP Perwakilan Jatim untuk percepatan finalisasi hasil evaluasi.
	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas Pengendalian Risiko	Indeks Manajemen Risiko	Renstra 2024–2026	3,200	3.914*	122,31	Perangkat Daerah telah menyusun register risiko dan rencana tindak pengendalian (RTP) dengan cukup memadai.	Mendorong integrasi manajemen risiko ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah secara digital.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung	Alternatif Soluasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkungan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan berpredikat SAKIP ≥ BB	Renstra 2024–2026	76%	80%	105,26	Melampaui target karena adanya efektivitas pendampingan APIP dalam penyusunan laporan kinerja PD.	Mempertahankan kualitas pendampingan dan menargetkan peningkatan jumlah PD dengan predikat A.
	Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	Renstra 2024–2026	90,50%	86,99	96,12	Tingginya tingkat kepatuhan PD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan internal.	Mempertahankan mekanisme pemantauan temuan audit internal setiap triwulan.
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Renstra 2024–2026	94,90%	95,43	100,55	Sinergi yang kuat antara Inspektorat dan OPD dalam penyelesaian rekomendasi auditor eksternal.	Melakukan akselerasi pada temuan lama yang masih menggantung
	Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center For Prevention (MCP)	Renstra 2024–2026	92	14,2	15,43	Belum dipenuhinya atas 8 area intervensi pencegahan korupsi	pemenuhan atas 8 area intervensi pencegahan korupsi dilakukan secara tepat waktu sebelum batas akhir pelaporan.
3	**Tujuan :** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Renstra 2025–2029	3,200	3.199	99,66	Komitmen pimpinan dalam mengimplementasikan elemen SPIP secara konsisten di seluruh lini organisasi.	Melakukan evaluasi mandiri (Self-Assessment) secara berkala untuk menuju target yang ditetapkan
4	**Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya penguatan	Nilai Kapabilitas APIP	Renstra 2025–2029	3,005	3,00**	99,83**	Realisasi secara angka melampaui target, namun	Melakukan koordinasi intensif dengan BPKP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung	Alternatif Soluasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk						status formal masih dalam proses evaluasi BPKP dengan pedoman baru.	Perwakilan Jatim untuk percepatan finalisasi hasil evaluasi.
	Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Renstra 2025–2029	3,200	3,194	99,81	Perangkat Daerah telah menyusun register risiko dan rencana tindak pengendalian (RTP) dengan cukup memadai.	Mendorong integrasi manajemen risiko ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah secara digital.
	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal	Renstra 2025–2029	90,50%	91,51	101,11	Tingginya tingkat kepatuhan PD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan internal.	Mempertahankan mekanisme pemantauan temuan audit internal setiap triwulan.
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Renstra 2025–2029	94,90%	95,43	100,55	Sinergi yang kuat antara Inspektorat dan OPD dalam penyelesaian rekomendasi auditor eksternal.	Melakukan akselerasi pada temuan lama yang masih menggantung untuk mencapai standar Provinsi Jatim (97,92%).
	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP	Indeks Pencegahan Korupsi daerah	Renstra 2025–2029	95,22	93	97.66	Meski belum 100% terhadap baseline RPJMD, namun telah memenuhi standar minimal pencegahan korupsi daerah.	Meningkatkan internalisasi budaya integritas melalui kampanye anti-korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan tabel di atas, kinerja Inspektorat Kabupaten Nganjuk tahun 2025 rata-rata diatas 91% sehingga dikategorikan tercapai.

a. Dominasi Capaian: Mayoritas indikator mencapai tingkat kemajuan di atas 100% dari target yang ditetapkan dalam Renstra Renstra 2025-2029. Adapaun pada akhir triwulan III capain MCP KPK sangat rendah sehingga perlu mendapat perhatian dan akselerasi percepatan pemenuhan dokumen.

b. Posisi Strategis: Secara keseluruhan, Kabupaten Nganjuk telah mampu memenuhi standar nasional pada aspek SPIP, MRI, dan MCP KPK, serta menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada akhir triwulan IV tahun 2025.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk didukung sumberdaya anggaran untuk merealisasikan target tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebesar Rp15.464.551.612,00 dengan realisasi sebesar Rp12.844.877.775 maka capaian kinerja anggaran sebesar 83,06%. Efisiensi penggunaan sumberdaya Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Capaian (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
1	**Tujuan:** Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	Nilai Maturitas SPIP	Renstra 2024–2026	124,59*	42,19	33,86
2	**Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	Renstra 2024–2026	100		
	Strategis 2: Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Renstra 2024–2026	122,59*		
	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas Pengendalian Risiko	Indeks Manajemen Risiko	Renstra 2024–2026	122,31*		
	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkungan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan berpredikat SAKIP ≥ BB	Renstra 2024–2026	105,26		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Capaian (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
	Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	Renstra 2024–2026	96,12		
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Renstra 2024–2026	100,55		
	Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center For Prevention (MCP)	Renstra 2024–2026	15,43		
3	**Tujuan :** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Renstra 2025–2029	99,66	83.06	16,66
4	**Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk	Nilai Kapabilitas APIP	Renstra 2025–2029	99,83**		
	Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Renstra 2025–2029	99,81		
	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal	Renstra 2025–2029	101,11		
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Renstra 2025–2029	100,55		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Capaian (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP	Indeks Pencegahan Korupsi daerah	Renstra 2025–2029	97.66		

***)** Hasil Penilan Mandiri Tahun 2025
**) Hasil Penilaian Tahun 2024

Tingkat efisiensi anggaran belanja merupakan ukuran sebuah keberhasilan dari suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Penyelenggaraan tugas pengawasan pada tahun 2025 merupakan periode transisi strategis di mana target-target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024–2026 dilanjutkan secara berkesinambungan ke dalam Renstra 2025–2029. Meskipun terdapat perbedaan narasi dan perbedaan Penetapan Target pada metodologi pelaporan triwulanan, realisasi kinerja akhir tahun anggaran 2025 menunjukkan tren positif yang konsisten di kedua dokumen tersebut.

Pada Triwulan III Tahun 2025 dengan capain tujuan yang merupakan hasil penilaian mandiri jika dibandingkantingkat penyerapan yang masih rendah di angka 42,19% menunjukkan efisiensi anggaran yang cukup besar yaitu 33,86%, namun karen abelum merupakan nilai final sehingga belum dapat diakui secara sah atas capaiantersebut. Pada akhir tahun 2025 penilaian SPIP telah keluar dengan capaian sebesar 99,66% dengan realisasi anggaran 83,06%, mengindikasikan efisiensi yang tinggi. Terdapat penghematan anggaran sebesar 16,66% untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada akhir triwulan IV Tahun 2025.

A.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1.7
Analisa Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	**Tujuan:** Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian	Nilai Maturitas SPIP	Renstra 2024–2026		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**Nilai SAKIP Inspektorat Daerah**	**87**	**82.95**	**95.34**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	Internal Terintegrasi								
2	**Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	Renstra 2024–2026	1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja daerah yang disusun	11 Dokumen	10 Dokumen	90.90
3	**Strategis 2:** Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Renstra 2024–2026	**2**	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	98 Dokumen	61 Dokumen	62.24
	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas Pengendalian Risiko	Indeks Manajemen Risiko		**3**	Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	18 Dokumen	10 Dokumen	55.55
	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkungan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan berpredikat SAKIP ≥ BB		**4**	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	51 Dokumen	49 Dokumen	96.07
	Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti		5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	50 Dokumen	39 Dokumen	78.00
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti		6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan	241 Unit	141 Unit	58.50

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center For Prevention (MCP)		7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa umum dan penunjang urusan pemeintahan daerah	12 Laporan	9 Laporan	75.00
				8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpelihara	128 Unit	33 Unit	25.78
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP**	**70 %**	106.66 **%**	152.37
					Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Persentase jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti**	**92 %**	87.53 **%**	**95.14**
						Persentase jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindak lanjuti	80 %	95.42 %	119.27
						Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah (mandatory) yang direviu	100 %	100 %	100%
						Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan manajemen Risiko	35 OPD	52 OPD	148.57

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
					Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan	2 Laporan	3 Laporan	150
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)	15 %	0 %	0.00
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50.00
					Kegiatan Pendampingan dan aistensi	Jumlah perangkat daerah yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	100.00
1	**Tujuan :** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Renstra 2025-2029	**A.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai SAKIP Inspektorat Daerah**	**87 Nilai**	**82,95 Nilai**	**95,34%**
2	**Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk	Nilai Kapabilitas APIP	Renstra 2025-2029	**1.**	**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja**	12 Dokumen	12 Dokumen	**100%**
3	**Sasaran Strategis 2:** Meningkatnya kualitas	Indeks Manajemen Risiko	Renstra 2025-2029	**2**	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan	85 Dokumen	82 Dokumen	**96,47%**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	pengendalian risiko Pemerintah Daerah				Perangkat Daerah	perangkat daerah			
4	**Sasaran Strategis 3:** Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal	Renstra 2025-2029	**3.**	Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	18 Dokumen	14 Dokumen	**77,77%**
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Renstra 2025-2029	**4.**	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	47 Dokumen	45 Dokumen	**95,74%**
5	**Sasaran Strategis 4:** Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP	Indeks Pencegahan Korupsi daerah	Renstra 2025-2029	**5**	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	50 Dokumen	50 Dokumen	**100%**
				6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan	**283 Unit**	**280 Unit**	**98,93%**
				7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan	12 Laporan	**100%**
				8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan	90 Unit	176 Unit	**195,55 %**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
7	**Sasaran Strategis 6:** Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center For Prevention (MCP)	Renstra 2024–2026	B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP	**70%**	**100%**	**142,85 %**
				1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	92%	91,51%	99,46
						Prostatese jumlah Rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti	80%	95,43%	119.28 %
						Jumlah PD yang menerapkan manajemen risiko	35%	50 OPD	142,85
						Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah (Mandatory) yang direviu	100%	100%	100%
				2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan	11 Laporan	203 Laporan	**1845%**
				C.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)	**15%**	**74%**	**493%**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
				1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	2 kegiatan	2 Kegiatan	**100%**
				2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	52 OPD	52 OPD	**100%**

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk

Keberhasilan pencapaian target strategis yang tertuang dalam Renstra 2024–2026 dan Renstra 2025–2029 merupakan hasil dari kontribusi dari 2 (dua) program utama dan 1 (satu) program penunjang dan telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berorientasi hasil. Hal ini berdampak pada pencapaian kinerja. Berikut Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 :

1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

Kontribusi terhadap Keberhasilan: Program ini merupakan penunjang utama (*enabler*) bagi peningkatan Kapabilitas APIP (3,69)* yang masih dalam proses evaluasi BPKP dan Indeks MCP KPK (93).

- **Kegiatan Pendampingan dan Asistensi:** Keberhasilan melampaui target Kapabilitas APIP sebesar 122,59% dipengaruhi secara langsung oleh intensitas layanan pendampingan dan asistensi kepada seluruh Perangkat Daerah.
- **Aksi Pencegahan Korupsi:** Capaian MCP yang berada di atas target RPD didukung oleh kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan korupsi yang mencapai target kinerja program sebesar 493%. Hal ini membuktikan bahwa peran Inspektorat sebagai *consulting partner* berjalan efektif.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kontribusi terhadap Keberhasilan: Program ini berfokus pada fungsi audit dan monitoring yang berdampak langsung pada Sasaran Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi (TLHP) dan Maturitas SPIP.

- **Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP):** Realisasi TLHP APIP (91,51%) dan BPK (95,43%) yang melampaui target didorong oleh kegiatan "Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring dan Tindak Lanjut".
- **Kendala pada Pengawasan Tujuan Tertentu:** Terdapat tantangan pada kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu dan penanganan kerugian daerah yang penyerapannya baru mencapai 35,66% dan 13,61%. Meskipun tidak menghambat target strategis secara keseluruhan, hal ini menjadi faktor penyebab mengapa penyelesaian tindak lanjut belum bisa mencapai standar maksimal Provinsi Jawa Timur (97,92%).

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kontribusi terhadap Keberhasilan: Program ini menyediakan pondasi operasional bagi seluruh kegiatan pengawasan.

- **Nilai SAKIP Inspektorat:** Keberhasilan meraih nilai SAKIP internal sebesar 95,34% menunjukkan bahwa manajemen internal Inspektorat sangat tertib. Hal ini berbanding lurus dengan keberhasilan sasaran strategis Persentase PD berpredikat SAKIP ≥ BB yang mencapai 80% (105,26% dari target) kategori tercapai dengan catatan yaitu masih ada opd yang perlu di lakukan pendampingan guna peningkatan nilai SAKIP.
- **Efisiensi Perencanaan:** Ketepatan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan koordinasi penganggaran memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran yang disediakan pada Tahun Anggaran 2025 untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Deerah Kabupaten Nganjuk bersumber pada APBD Perubahan Kabupaten Nganjuk TA. 2025 sebesar Rp15.464.551.612 dengan realisasi sebesar Rp12.844.877.775 atau 83,06% Dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2025

Program/Kegiatan			Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			**13.953.321.832,50**	**11.644.834.465,00**	**2.308.487.367,50**	**83,46**
1.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**30.004.000,00**	**18.699.000,00**	**11.305.000,00**	**62,32**
	a.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	14.554.000,00	12.534.000,00	**2.020.000,00**	86,12
	b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.800.000,00	3.984.000,00	**816.000,00**	83,00

Program/Kegiatan			Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Capaian (%)
	c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.800.000,00	820.000,00	**3.980.000,00**	17,08
	d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.850.000,00	1.361.000,00	**4.489.000,00**	23,26
2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**8.951.730.000,00**	**7.683.783.800,00**	**1.267.946.200,00**	**85,84**
	a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.833.770.000,00	7.584.378.800,00	**1.249.391.200,00**	**85,86**
	b.	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.280.000,00	94.080.000,00	**16.200.000,00**	**85,31**
	c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.680.000,00	5.325.000,00	**2.355.000,00**	**69,34**
3	**Administrasi Barang Milik Daerah**		**16.698.000,00**	**14.557.000,00**	**2.141.000,00**	**87,18**
	a.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Miiik Daerah	3.114.000,00	2.354.000,00	**760.000,00**	**75,59**
	b.	Rekonsialiasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.584.000,00	12.203.000,00	**1.381.000,00**	**89,83**
4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**1.258.293.697,50**	**861.987.072,00**	**396.306.625,50**	**68,50**
	a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	1.004.360.000,00	727.927.072,00	**276.432.928,00**	**72,48**
	b.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	151.213.500,00	134.060.000,00	**17.153.500,00**	**88,66**
	c	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	102.720.197,50	0,00	**102.720.197,50**	**0,00**
5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**979.035.580,00**	**757.217.650,00**	**221.817.930,00**	**77,34**
	a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.277.435,00	27.826.140,00	**451.295,00**	**98,40**
	b.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.275.000,00	5.244.620,00	**9.030.380,00**	**36,74**
	c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.524.500,00	9.864.010,00	**9.660.490,00**	**50,52**
	d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	198.396.495,00	178.605.050,00	**19.791.445,00**	**90,02**

Program/Kegiatan			Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Capaian (%)
	e.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.789.150,00	33.600.950,00	**1.188.200,00**	**96,58**
	f.	Penyediaan Bacaan dan Perundang-undangan	12.000.000,00	11.400.000,00	**600.000,00**	**95,00**
	g.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.283.000,00	18.559.195,00	**14.723.805,00**	**55,76**
	h.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	555.240.000,00	419.815.533,00	**135.424.467,00**	**75,61**
	i.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	83.250.000,00	52.302.152,00	**30.947.848,00**	**62,83**
6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah**		**1.459.879.985,00**	**1.380.057.712,00**	**79.822.273,00**	**94,53**
	a.	Pengadaan Mebel	532.430.870,00	490.849.704,00	**41.581.166,00**	**92,19**
	b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	927.449.115,00	889.208.008,00	**38.241.107,00**	**95,88**
7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**480.050.000,00**	**365.916.389,00**	**114.133.611,00**	**76,22**
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.250.000,00	3.612.600,00	**7.637.400,00**	**32,11**
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.600.000,00	99.067.289,00	**87.532.711,00**	**53,09**
	c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	282.200.000,00	263.236.500,00	**18.963.500,00**	**93,28**
8	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**777.630.570,00**	**562.615.842,00**	**215.014.728,00**	**72,35**
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeriksaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasonal atau Lapangan	203.724.650,00	124.538.282,00	**79.186.368,00**	61,13
	b.	Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	12.520.000,00	**7.480.000,00**	62,60
	c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.572.000,00	32.119.000,00	**23.453.000,00**	57,80
	d.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	498.333.920,00	393.438.560,00	**104.895.360,00**	78,95
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			**586.420.000**	**386.856.410**	**199.563.590,00**	65,97
1	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		**427.777.000**	**330.278.910**	**97.498.090,00**	**77,21**

Program/Kegiatan			Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Capaian (%)
	a.	Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	145.437.000	116.737.710	**28.699.290,00**	80,27
	b.	Reviu Laporan Kinerja	20.792.000	17.279.000	**3.513.000,00**	83,10
	c.	Reviu Laporan Keuangan	42.120.000	32.693.500	**9.426.500,00**	77,62
	d.	Pengawasan Desa	54.000.000	30.000.000	**24.000.000,00**	55,56
	e.	Kerjasama Pengawasan Internal	39.150.000	34.450.000	**4.700.000,00**	87,99
	f.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	126.278.000	99.118.700	**27.159.300,00**	78,49
2	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**		**158.643.000**	**56.577.500**	**102.065.500,00**	**35,66**
	a.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	32.410.000	4.410.000	**28.000.000,00**	13,61
	b.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	126.233.000	52.167.500	**74.065.500,00**	41,33
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			**924.809.779,50**	**813.186.900**	**111.622.879,50**	87,93
1.	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**		**319.810.000**	**282.620.000**	**37.190.000,00**	88,37
	a.	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	131.810.000	113.170.000	**18.640.000,00**	85,86
	b.	Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi pengawasan	188.000.000	169.450.000	**18.550.000,00**	90,13
2	**Kegiatan Pendampingan dan asistensi**		**604.999.779,50**	**530.566.900**	**74.432.879,50**	***87,70***
	a.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	44.690.000,00	17.861.000	**26.829.000,00**	39,97
	b.	Pendampingan, Asistensi, Verivikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40.960.000,00	31.416.500	**9.543.500,00**	76,70
	c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	497.829.779,50	465.879.400	**31.950.379,50**	93,58
	d.	Pendampingan, Asistensi dan Verivikasi Penegakan Integritas	21.520.000,00	15.410.000	**6.110.000,00**	71,61
JUMLAH			**15.464.551.612,00**	**12.844.877.775**	**2.619.673.837,00**	**83,06**

Secara keseluruhan, penggunaan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2025 menunjukkan korelasi yang positif antara penyerapan finansial dengan pencapaian target kinerja strategis. Total anggaran yang dialokasikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 adalah sebesar Rp15.464.551.612,00.

Realisasi total anggaran hingga akhir periode pelaporan mencapai 83,06% dengan kategori tercapai dengan beberapa catatan, berikut adalah rincian per program:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Menyerap anggaran sebesar 83,46% dari pagu Rp13.953.321.832,50, Anggaran ini secara efektif mendukung operasional kantor, termasuk pemeliharaan barang milik daerah dan administrasi kepegawaian untuk menjaga ritme kerja organisasi.
2) Program Penyelenggaraan Pengawasan: Terealisasi sebesar 65,97%. Meskipun penyerapan paling rendah di antara program lain, program ini berhasil mendukung indikator TLHP APIP mencapai 91,51% (melebihi target 91%) dan TLHP BPK mencapai 95,43% (melebihi target 94,95%).
3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi: Mencatat realisasi anggaran yang cukup tinggi sebesar 87,93%. Anggaran ini berkontribusi langsung pada pencapaian Indeks MCP KPK sebesar 92,7 dan nilai Kapabilitas APIP

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa organisasi telah menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan akuntabel. Mayoritas indikator kinerja strategis berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra 2024–2026 dan Renstra 2025-2029, dengan beberapa poin utama sebagai berikut:

- Efektivitas Sistem Pengendalian: Nilai Maturitas SPIP mencapai 3,199 (99,66%) dan Indeks Manajemen Risiko mencapai 3,194 (99,50%), yang menunjukkan bahwa tata kelola internal organisasi telah berada di atas standar nasional.
- Akselerasi Kapabilitas APIP: belum dilaksanakan penilaian kapabilitas APIP sampai dengan akhir tahun anggaran 2025, sehingga realisasi yang dicatat adalah realisasi tahun lalu sebesar 3,00**, melampaui target RPD sebesar 122,19% dan target baseline RPJMD sebesar 121,78%.
- Kepatuhan Tindak Lanjut: Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan, baik APIP (91,51%) maupun BPK (95,43%), telah melampaui target Renstra 2025-2029 dengan tingkat kemajuan di atas 100%.
- Efisiensi Anggaran: Organisasi berhasil mencapai kinerja yang ditargetkan dengan penyerapan anggaran yang optimal sebesar 83,06% dari total pagu Rp15.464.551.612,00. Khusus pada indikator SPIP dan MCP.

4.2 Langkah Strategis Peningkatan Kinerja

Meskipun sebagian besar target tercapai, Inspektorat tetap mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk periode berikutnya, terutama dalam masa transisi menuju Renstra 2025–2029:

1. Akselerasi Penyelesaian Temuan Eksternal: Melakukan pendampingan lebih intensif bagi Perangkat Daerah untuk mengejar ketertinggalan pada indikator Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK agar dapat memenuhi standar Provinsi Jawa Timur sebesar 97,92%.
2. Penguatan Pencegahan Korupsi (MCP): Melakukan upaya ekstra pada 8 area intervensi KPK untuk menutup selisih capaian (92,7) terhadap target Renstra 2025-2029 yang lebih tinggi (95,3) akibat adanya pengetatan parameter penilaian.
3. Finalisasi Status Kapabilitas APIP: Berkoordinasi secara proaktif dengan BPKP Perwakilan Jawa Timur untuk menyelesaikan proses evaluasi agar capaian Kapabilitas APIP dapat segera diperoleh.

Demikian laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas pengawasan di masa mendatang.

Nganjuk, 06 FEB 2026

Inspektur Daerah
Kabupaten Nganjuk

Samsul Huda, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMSUL HUDA, SH., MH
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA
Jabatan : Bupati Nganjuk
Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 31 - 10 - 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Bupati Nganjuk	Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk
Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., MM., M.BA	**Samsul Huda, SH., MH** Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19660810 199203 1 011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk	Nilai Kapabilitas APIP	3,005
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Risiko Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,200
3	Meningkatnya Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal (APIP) dan Eksternal (BPK-RI)	Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal	90,50 %
4	Meningkatnya Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal (APIP) dan Eksternal (BPK-RI)	Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal	94,90 %
5	Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP	Indek Pencegahan Korupsi Daerah	95,22

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.953.321.832,50	DAU
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 586.420.000	DAU
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 924.809.779,50	DAU
	Jumlah	**Rp 15.464.551.612,00**	

Nganjuk, 31-10-2025

Pihak Kedua

Bupati Nganjuk

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., MM., M.BA

Pihak Pertama

Inspektur Daerah
Kabupaten Nganjuk

Samsul Huda, SH., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660810 199203 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI HANDOKO TARUNA, S.STP., M.Si
Jabatan : Pj. Bupati Nganjuk
Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 3 - 1 - 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Pj. Bupati Nganjuk	Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk
SRI HANDOKO TARUNA, S.STP., M.Si	**Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si** Pembina Utama Madya NIP. 19661005 198703 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	32%
2	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Nilai Kapabilitas APIP	3,010
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Risiko Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,200
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkungan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan berpredikat SAKIP ≥ BB	76 %
5	Meningkatnya Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	90,50 %
6	Meningkatnya Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti	94,90 %
7	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas	Indek Pencegahan Korupsi Daerah *Monitoring Center for Prevention (MCP)*	92,00

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.347.262.065	DAU
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 940.611.700	DAU
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 1.500.669.562	DAU
	Jumlah	**Rp 22.788.543.327**	

Nganjuk, 3 - 1 - 2025

Pihak Kedua

Pj. Bupati Nganjuk

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP., M.Si

Pihak Pertama

Inspektur Daerah
Kabupaten Nganjuk

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Panglima Sudirman No. 284 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 321196 &321712Fax (0358) 321196
Email : inspektorat@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188/ 08 /K/411.200/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan Keputusan Inspektur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan acuan kinerja Inspektorat Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 04 JAN 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK
Nomor : 188/ 08 /K/411.200/2024
Tanggal : 04 JAN 2024
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

1. NAMA ORGANISASI : KABUPATEN NGANJUK
2. NAMA UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT DAERAH
3. TUGAS : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. FUNGSI :
   a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
   b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
   c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
   d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
   e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
   f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
   g. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
   h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah tanpa menunggu penugasan dari

Bupati;

i. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pememerintah Pusat; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Sasaran		
			2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	30%	32%	32%

Nganjuk, 04 JAN 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Panglima Sudirman No. 284 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 321196 &321712Fax (0358) 321196
Email : inspektorat@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 100.3.3.2/ 55 /K/411.200/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Inspektur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan acuan kinerja Inspektorat Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 - 09 - 2025

a.n Bupati Nganjuk
Inspektur Daerah
Kabupaten Nganjuk

Samsul Huda, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 100.3.3.2/ 55 /K/411.200/2025
Tanggal : 30 - 09 - 2025
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1. NAMA ORGANISASI : KABUPATEN NGANJUK
2. NAMA UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT DAERAH
3. TUGAS : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. FUNGSI :
   a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
   b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
   c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
   d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
   e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
   f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
   g. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
   h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah tanpa menunggu penugasan dari

Bupati;

i. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pememerintah Pusat; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah yang baik melalui kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	Maturitas SPIP	Nilai	a) Konsep: Tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah b) Definisi Operasional: Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk	Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP Perwakilan	Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada level perangkat daerah selama tahun sebelumnya (n-1) untuk pencapaian tujuan dan tahun berkenaan (n) untuk penetapan tujuan serta struktur proses		
				c) Formulasi Perhitungan: Nilai Maturitas SPIP didasarkan pada: 1. Komponen Penetapan		

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Tujuan dengan bobot (40%) yang meliputi unsur: a. Kualitas sasaran strategis b. Kualitas sasaran strategi pencapaian sasaran strategis 2. Komponen Struktur dan Proses dengan bobot (30%) yang meliputi unsur: a. Lingkungan pengendalian b. Penilaian risiko c. Kegiatan pengendalian d. Informasi dan komunikasi e. Pemantauan		

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				3. Pencapaian Tujuan SPIP dengan bobot (30%) yang meliputi unsur: a. Efektivitas dan efisiensi b. Keandalan laporan keuangan c. Pengamanan atas aset d. Ketaatan pada peraturan		
2	Meningkatnya Penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	a) Konsep: Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah merupakan Penilaian atas penerapan tata kelola APIP dengan mengacu kepada Internal Audit Capabilitas Model	Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan	

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				(IACM)		
				b) Definisi Operasional: Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif		
				c) Formulasi Perhitungan: Komponen penilaian Kapabilitas APIP: 1. Pengelolaan SDM (30%) 2. Praktik Profesional (30%)		

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				3. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (10%) 4. Budaya dan Hubungan Organisasi (10%) 5. Struktur Tata Kelola (20%) 6. Peran dan Layanan APIP (40%)		
3	Meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	a) Konsep: Kualitas penerapan manajemen risiko yang diperoleh dari penilaian pengelolaan risiko yang dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama	Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP Perwakilan	
				b) Definisi Operasional: Indeks manajemen risiko adalah indeks yang		

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko		
				c) Formulasi Perhitungan: Komponen penilaian indeks manajemen risiko: 1. Perencanaan (40%) a. Kualitas perencanaan (40%) 2. Kapabilitas (30%) a. Kepemimpinan (5%) b. Kebijakan manajemen risiko (5%) c. Sumber daya manusia (5%) d. Kemitraan (2,50%)		

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				e. Proses manajemen risiko (12,5%) 3. Hasil a. Aktivitas penanganan risiko (18,75%) b. Outcomes (11,25%)		
4	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)	Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal	Persentase (%)	a) Konsep: Ukuran tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh APIP	Laporan Evaluasi Berkala Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Triwulanan	
				b) Definisi Operasional: Rasio antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang telah ditindaklanjuti		

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				dengan total rekomendasi yang harus ditindaklanjuti		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah rekomendasi pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti / Seluruh rekomendasi atas pengawasan APIP		
5		Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal	Persentase (%)	a) Konsep: Ukuran tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK	Laporan Hasil Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semesteran	
				b) Definisi Operasional: Rasio antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang		

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				telah ditindaklanjuti dengan total rekomendasi yang harus ditindaklanjuti		
				c) Formulasi Perhitungan: Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti / Seluruh rekomendasi atas pemeriksaan BPK-RI		
6	Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP	Indeks pencegahan korupsi daerah	Indeks	a) Konsep: Indeks pencegahan korupsi daerah menggambarkan komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam mengurangi potensi terjadinya korupsi melalui sistem pencegahan yang terstruktur dan berkelanjutan. Sistem	Aplikasi JAGA.ID	

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi		
				b) Definisi Operasional: Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola, sistem pengendalian, transparansi,		

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				akuntabilitas, serta pembangunan budaya integritas		
				c) Formulasi Perhitungan: Perhitungan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah berdasarkan area intervensi: a. Area perencanaan b. Area penganggaran c. Area pengadaan barang dan jasa d. Area Pelayanan Publik e. Area pengawasan APIP f. Area Manajemen ASN g. Area pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)		

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				h. Area optimalisasi penerimaan daerah		

a.n Bupati Nganjuk
Inspektur Daerah
Kabupaten Nganjuk

Samsul Huda, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

SKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat									Rp19.686.192.312,00	Rp3.102.351.015,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.788.543.327,00	Rp13.536.587.707,00	Rp1.927.963.905,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.464.551.612,00	(Rp7.323.991.715,00)	(47.36)	
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp19.686.192.312,00	Rp3.102.351.015,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.788.543.327,00	Rp13.536.587.707,00	Rp1.927.963.905,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.464.551.612,00	(Rp7.323.991.715,00)	(47.36)	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**				Rp19.686.192.312,00	Rp3.102.351.015,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.788.543.327,00	Rp13.536.587.707,00	Rp1.927.963.905,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.464.551.612,00	(Rp7.323.991.715,00)	(47.36)	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp17.244.911.050,00	Rp3.102.351.015,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.347.262.065,00	Rp12.025.357.927,50	Rp1.927.963.905,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.953.321.832,50	(Rp6.393.940.232,50)	(45.82)	
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp63.033.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.033.500,00	Rp30.004.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.004.000,00	(Rp33.029.500,00)	(110.08)	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp33.018.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.018.500,00	Rp14.554.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.554.000,00	(Rp18.464.500,00)	(126.87)	
6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.420.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.420.000,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	(Rp4.620.000,00)	(96.25)	
6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.420.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.420.000,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	(Rp4.620.000,00)	(96.25)	
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.175.000,00	Rp5.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.850.000,00	(Rp5.325.000,00)	(91.03)	
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp7.875.798.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.875.798.000,00	Rp8.951.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.951.730.000,00	Rp1.075.932.000,00	12.02	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.788.543.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.788.543.000,00	Rp8.833.770.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.833.770.000,00	Rp1.045.227.000,00	11.83	
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp72.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.180.000,00	Rp110.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.280.000,00	Rp38.100.000,00	34.55	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.075.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.075.000,00	Rp7.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.680.000,00	(Rp7.395.000,00)	(96.29)	
6	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp24.624.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.624.000,00	Rp16.698.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.698.000,00	(Rp7.926.000,00)	(47.47)	
6	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.840.000,00	Rp3.114.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.114.000,00	(Rp3.726.000,00)	(119.65)	
6	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.784.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.784.000,00	Rp13.584.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.584.000,00	(Rp4.200.000,00)	(30.92)	
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp7.160.086.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.160.086.980,00	Rp1.258.293.697,50	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.258.293.697,50	(Rp5.901.793.282,50)	(469.03)	
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp28.201.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.201.980,00	Rp102.720.197,50	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.720.197,50	Rp74.518.217,50	72.54	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.909.149.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.909.149.000,00	Rp1.004.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.004.360.000,00	(Rp5.904.789.000,00)	(587.92)	
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp222.736.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp222.736.000,00	Rp151.213.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.213.500,00	(Rp71.522.500,00)	(47.30)	
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp1.297.778.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.297.778.170,00	Rp979.035.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp979.035.580,00	(Rp318.742.590,00)	(32.56)	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp28.277.435,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.277.435,00	Rp28.277.435,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.277.435,00	Rp0,00	0.00	
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.275.000,00	Rp14.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.275.000,00	Rp0,00	0.00	
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp19.524.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.524.500,00	Rp19.524.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.524.500,00	Rp0,00	0.00	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp220.403.685,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp220.403.685,00	Rp198.396.495,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.396.495,00	(Rp22.007.190,00)	(11.09)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						Umum (DAU)															
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.308.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.308.550,00	Rp34.789.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.789.150,00	(Rp519.400,00)	(1.49)	
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	0.00	
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp33.283.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.283.000,00	Rp33.283.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.283.000,00	Rp0,00	0.00	
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp851.456.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp851.456.000,00	Rp555.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp555.240.000,00	(Rp296.216.000,00)	(53.35)	
6	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp83.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.250.000,00	Rp83.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.250.000,00	Rp0,00	0.00	
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp12.903.750,00	Rp2.648.913.095,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.661.816.845,00	Rp16.650.000,00	Rp1.443.229.985,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.459.879.985,00	(Rp1.201.936.860,00)	(82.33)	
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp1.201.936.860,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.201.936.860,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp1.201.936.860,00)	(Infinity)	
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp532.430.870,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp532.430.870,00	Rp0,00	Rp532.430.870,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp532.430.870,00	Rp0,00	0.00	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.903.750,00	Rp914.545.365,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp927.449.115,00	Rp16.650.000,00	Rp910.799.115,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp927.449.115,00	Rp0,00	0.00	
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp480.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp480.050.000,00	Rp480.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp480.050.000,00	Rp0,00	0.00	
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.250.000,00	Rp11.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.250.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp186.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp186.600.000,00	Rp186.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp186.600.000,00	Rp0,00	0.00	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp282.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp282.200.000,00	Rp282.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp282.200.000,00	Rp0,00	0.00	
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp330.636.650,00	Rp453.437.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp784.074.570,00	Rp292.896.650,00	Rp484.733.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp777.630.570,00	(Rp6.444.000,00)	(0.83)	
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp210.124.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.124.650,00	Rp203.724.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.724.650,00	(Rp6.400.000,00)	(3.14)	
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	0.00	
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.512.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.512.000,00	Rp55.572.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.572.000,00	(Rp44.940.000,00)	(80.87)	
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp453.437.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp453.437.920,00	Rp13.600.000,00	Rp484.733.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp498.333.920,00	Rp44.896.000,00	9.01	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**				Rp940.611.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp940.611.700,00	Rp586.420.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp586.420.000,00	(Rp354.191.700,00)	(60.40)	
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**				Rp737.366.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp737.366.700,00	Rp427.777.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp427.777.000,00	(Rp309.589.700,00)	(72.37)	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp154.786.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.786.000,00	Rp145.437.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp145.437.000,00	(Rp9.349.000,00)	(6.43)	
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp31.424.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.424.000,00	Rp20.792.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.792.000,00	(Rp10.632.000,00)	(51.14)	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp44.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.520.000,00	Rp42.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.120.000,00	(Rp2.400.000,00)	(5.70)	
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Dana Alokasi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua		Rp54.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.000.000,00	Rp54.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						Umum (DAU)	Kelurahan/Desa														
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp52.178.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.178.200,00	Rp39.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.150.000,00	(Rp13.028.200,00)	(33.28)	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp400.458.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.458.500,00	Rp126.278.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.278.000,00	(Rp274.180.500,00)	(217.12)	
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**				Rp203.245.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.245.000,00	Rp158.643.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.643.000,00	(Rp44.602.000,00)	(28.11)	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.410.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.410.000,00	Rp32.410.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.410.000,00	Rp0,00	0.00	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp170.835.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.835.000,00	Rp126.233.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.233.000,00	(Rp44.602.000,00)	(35.33)	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**				Rp1.500.669.562,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.669.562,00	Rp924.809.779,50	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp924.809.779,50	(Rp575.859.782,50)	(62.27)	
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**				Rp330.910.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp330.910.000,00	Rp319.810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp319.810.000,00	(Rp11.100.000,00)	(3.47)	
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp142.910.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.910.000,00	Rp131.810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.810.000,00	(Rp11.100.000,00)	(8.42)	
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp188.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.000.000,00	Rp188.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.000.000,00	Rp0,00	0.00	
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**				Rp1.169.759.562,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.169.759.562,00	Rp604.999.779,50	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp604.999.779,50	(Rp564.759.782,50)	(93.35)	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp397.850.060,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp397.850.060,00	Rp44.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.690.000,00	(Rp353.160.060,00)	(790.24)	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp68.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.020.000,00	Rp40.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.960.000,00	(Rp27.060.000,00)	(66.06)	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Dana Alokasi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua		Rp665.989.502,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp665.989.502,00	Rp497.829.779,50	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp497.829.779,50	(Rp168.159.722,50)	(33.78)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Pemberantasan Korupsi	Umum (DAU)	Kelurahan/Desa														
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp37.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.900.000,00	Rp21.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.520.000,00	(Rp16.380.000,00)	(76.12)	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.324.456.510,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp5.520.862.674,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp2.832.418.253,87
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp3.786.814.174,13
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp15.464.551.612,00**

Nganjuk, Tanggal 20 Oktober 2025
INSPEKTUR

SAMSUL HUDA, SH, MH
NIP. 196608101992031011

Mengesahkan,
PPKD

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
NIP. 196805111992022001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Drs. ADAM MUHARTO, A.P., M.Si	197305111993111002	Wakil Ketua	
3.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si	196805111992022001	Sekretaris	

*) Sesuai periodisasi SPD

8. LAMPIRAN BUKTI DUKUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Tujuan:** Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	Nilai Maturitas SPIP	Renstra 2024–2026	3,2	3.987*	124,59	https://drive.google.com/file/d/1lcBos8Qxjo0K6jgskog92-lbwvqd6wad/view?usp=drive_link
	Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	Renstra 2024–2026	32%	32%	100	https://drive.google.com/file/d/1lcBos8Qxjo0K6jgskog92-lbwvqd6wad/view?usp=drive_link
	Strategis 2: Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Renstra 2024–2026	3,01	3.69*	122,59	https://drive.google.com/file/d/1vFNBtTPfPEVS32BXlbbsTZw5CQLlatLf/view?usp=drive_link
	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas Pengendalian Risiko	Indeks Manajemen Risiko	Renstra 2024–2026	3,2	3.914*	122,31	https://drive.google.com/file/d/1lcBos8Qxjo0K6jgskog92-lbwvqd6wad/view?usp=drive_link
	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkungan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan berpredikat SAKIP ≥ BB	Renstra 2024–2026	76%	80%	105,26	https://drive.google.com/file/d/1OTY0fTaD7W3_birbMbHWOscEeo4RUHdQ/view?usp=drive_link
	Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	Renstra 2024–2026	90,50%	86,99	96,12	https://drive.google.com/file/d/1F0G3HQVfFKnAnZumAAb1t9JNW1q2t69b/view?usp=drive_link
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Renstra 2024–2026	94,90%	95,43	100,55	https://drive.google.com/file/d/1SjwZVdo8P1hTIlJAquMQ7VIEcXBN_oQd/view?usp=drive_link
	Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kualitas Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center For Prevention (MCP)	Renstra 2024–2026	92	14,2	15,43	https://drive.google.com/file/d/1vrJf2hkxbeC7SUS1RumWE6q8lkyXLdD7/view?usp=drive_link
2	**Tujuan :** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Renstra 2025–2029	3,2	3.199	99,66	https://drive.google.com/file/d/1WknnRCA7n9EAq-RIPIY2efQPkcgTvbJB/view?usp=drive_link
	Sasaran Strategis 1: Meningkatnya penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk	Nilai Kapabilitas APIP	Renstra 2025–2029	3,005	3,00**	99,83	https://drive.google.com/file/d/1Flie4eLB8OotIV0ZO2a_dIIulbmSsLDB/view?usp=drive_link
	Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Renstra 2025–2029	3,2	3,194	99,81	https://drive.google.com/file/d/1WknnRCA7n9EAq-RIPIY2efQPkcgTvbJB/view?usp=drive_link
	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal	Renstra 2025–2029	90,50%	91,51	101,11	https://drive.google.com/file/d/1WkAnmoY_fDST2JtGja5wVzils5e4wdDJ/view?usp=drive_link
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Renstra 2025–2029	94,90%	95,43	100,55	https://drive.google.com/file/d/1SjwZVdo8P1hTIlJAquMQ7VIEcXBN_oQd/view?usp=drive_link
	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP	Indeks Pencegahan Korupsi daerah	Renstra 2025–2029	95,22	93	97.66	https://drive.google.com/file/d/1Zf7AGSq1HGpJDK06oeCBvGxinN3vm-c/view?usp=sharing

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

SAMSUL HUDA, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

8. LAMPIRAN BUKTI DUKUNG REALISASI PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2024-2026

Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi		Capaian	Dokumen	Link Bukti Dukung
Renstra 2024-2026	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	87	Nilai	82.95	Nilai	95.34	LHE SAKIP	https://drive.google.com/file/d/1iO3Nn3AxpzEgEzRkki1pLTUqIUpwtzxr/view?usp=drive_link
	1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja daerah yang disusun	11	Dokumen	10	Dokumen	90.90	1. renja Perubahan 2025	https://drive.google.com/file/d/1YXbwRwab180E8-ugBfXxMK0KiCNqOR4Q/view?usp=drive_link
									2. Renja 2026	https://drive.google.com/file/d/1xcQ8kTfwpweKWFQ5kcX6_PAeFmUf8KpT/view?usp=drive_link
									3. RKA 2025	https://drive.google.com/file/d/1qCn6h0F_ZRiuWCZ5qYgqkED_PWrbNX2v/view?usp=sharing
									4.RKA perubahan 2025	https://drive.google.com/file/d/1u2CQ_VvROXbcodUYCxgfC4AtAjX0Pfom/view?usp=drive_link
									5. EVALUASI RENJA (3)	Evaluasi Renja TW I - III
									6. LKJIP (1) 2024	https://drive.google.com/file/d/1kpxQHumthcmsZyn7AJ8C2Txc4jySf8IL/view?usp=drive_link
									7. LPPD (1) 2024	https://drive.google.com/file/d/1zQqxFB9lmngWFJ9uqxiQn37kI06eiX1a/view?usp=drive_link
									8. LKPJ(1) 2024	https://drive.google.com/file/d/1OYJTedcpKnkw6mD2GTA0ngOfylArAd6K/view?usp=drive_link
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	98	Dokumen	61	Dokumen	62.24	1. Penyediaan Gaji (1)	https://drive.google.com/file/d/1Pp32DD6WkrzLyTr6F8TIIwa6EOl6H5tY/view?usp=drive_link
									2. SPP Gaji dan tunjangan 12 Dokumen	https://drive.google.com/drive/folders/1l8YdUVSs7s596veGzsXYDFY6snAVxc-r?usp=drive_link
									3. SPP TPP 10 Dokumen	https://drive.google.com/drive/folders/1uXxOzeH8mSstJ8WDgcSAbDv93XpFSya-?usp=drive_link
									4. Spp gu 11 Dokumen	https://drive.google.com/drive/folders/1AVtEMthFrUQP7kWY3yAy244Sm04W9HJs?usp=drive_link
									5. SPJ Fungsional 9 Dokumen	https://drive.google.com/drive/folders/1C4Ci3QAuoaYiPU_K3gOPEKQuaFlyZ73?usp=sharing
									6. laporan SPT masa jumlah 9 SPT	https://drive.google.com/drive/folders/1UHlike6QD5ILxRLWTu1ReNreqH2PHM4G?usp=drive_link
									7. laporan BKU 9 Laporan	https://drive.google.com/drive/folders/18AaCAtJ77vP9CEGbhz1XbCJEtUh-I7CB?usp=drive_link
	3	Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	18	Dokumen	10	Dokumen	55.55	1. RKBMD (2)	https://drive.google.com/drive/folders/1MFH_HgMeoFq6ofWYZ8qpkDn6qeo5Vnt7?usp=drive_link
									2. BA Habis pakai (8)	https://drive.google.com/drive/folders/1PSXvc_UCxNc7UISlIt-i8zUnQ6dxFTyK?usp=drive_link
	4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	51	Dokumen	49	Dokumen	96.07	1. daftar peserta Diklat s.d tw III	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uc-NfqGg1NZDFncrCe1qohpI4NlWJyXK/edit?usp=drive_link&ouid=117297225001318802056&rtpof=true&sd=true
									2. Bimtek (sosialisasi bimtek ZI,budaya pelayanan Prima	BIMTEK
	5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	50	Dokumen	39	Dokumen	78.00	- Rapat Koordinasi (26) - Fasilitasi kunjungan tamu (4) - Bahan Bacaan (9)	https://drive.google.com/drive/folders/1xDCbJ3WwjhZ9iy3tDSfD81-QixPby6pV?usp=drive_link
	6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan	241	Unit	141	Unit	58.50	BA Verifikasi dari Aset BPKAD	https://drive.google.com/file/d/1tehMW1HVzKKrwc5-VpTKbVHArAPvS4Zu/view?usp=drive_link

Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi		Capaian	Dokumen	Ling Bukti Dukunhg
	7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa umum dan penunjang urusan pemeintahan daerah	12	Laporan	9	Laporan	75.00	- Jasa Surat Menyurat (3) '- penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik(3) - Pelayanan Umum (3)	https://drive.google.com/file/d/1lgj31v8vuwBeCqa9Ayf3hdqmmM2NRcVE/view?usp=drive_link
	8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpelihara	128	Unit	33	Unit	25.78	- Pemelihaan kendaraan - Pemeliharaan Mebel - Pemeliharaan Peralanan Mesin - Pemeliharaan gedung kantor	https://drive.google.com/drive/folders/1QNnxXmZG7eINhPUZzXYhDcsT7I9qIF71?usp=drive_link
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP	70	%	106.66	%	152.37	PM SPIP	https://drive.google.com/file/d/1lcBos8Qxjo0K6jgskoq92-lbwvqd6wad/view?usp=drive_link
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	92	%	87.53	%	95.14	TL APIP TW III (EVALUASI BERKALA)	https://drive.google.com/file/d/1F0G3HOVfFKnAnZumAAb1t9JNW1q2t69b/view?usp=drive_link
			Persentase jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindak lanjuti	80	%	95.42	%	119.27	TL BPK SMT 1 2025	https://drive.google.com/file/d/1SjwZVdo8P1hTIlJAquMQ7VIEcXB
			Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah (mandatory) yang direviu	100	%	100	%	100%	REKAP PENUGASAN REVIU S.D TW III	https://drive.google.com/file/d/1h-ZGfHoDKdF2QR29Gd5i2hsfZJMzYJo/view?usp=drive_link
			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan manajemen Risiko	35	OPD	52	OPD	148.57	Evaluasi MR	https://drive.google.com/drive/folders/1qyNB-TzyXuFS M2-YIOOv6LWIoQaF5?usp=drive_link
	2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan	2	Laporan	3	Laporan	150	Rekap Penugasan PDTT	https://drive.google.com/file/d/1k8a21FnFrj0QrcPVcNxeqXD7i6mH2D-u/view?usp=drive_link
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)	15	%	0	%	0.00	Belum ada realisasi kegiatan	-
	1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	2	Kegiatan	1	Kegiatan	50.00	KLINIK KONSULTASI	https://drive.google.com/drive/folders/199GvslzRDmfH8OmYIoXzwmyUqvtxf1Wj?usp=drive_link
	2	Kegiatan Pendampingan dan aistensi	Jumlah perangkat daerah yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	52	Perangkat Daerah	52	Perangkat Daerah	100.00	PENDAMPINGAN, SAKIP, SPIP	https://drive.google.com/drive/folders/1hhptYqdo_zdnuwrneU8AMHtwsaf017n9?usp=drive_link

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

SAMSUL HUDA, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 196[illegible]0 199203 1 011

8. LAMPIRAN BUKTI DUKUNG REALISASI PROGRAM KEGIATAN 2025-2029

Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Dokumen	Link Bukti Dukung
Renstra 2025–2029	A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	87 Nilai	82,95 Nilai	95,34%	LHE SAKIP	https://drive.google.com/file/d/1iO3Nn3AxpzEgEzRkki1pLTUqlUpwtzxr/view?usp=drive_link
	1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	1. renja Perubahan 2025 2. Renja 2026 3. RKA 2025 4. RKA perubahan 2025 5. LKJIP (1) 2024 6. LPPD (1) 2024 7. LKPJ(1) 2024 8. EVALUASI RENJA TW 1- IV (4 dokumen) 9. Renstra 2025-2029	https://drive.google.com/drive/folders/1K4dROUiNr5ZBCm_jgNWszlVk3dLgknbm?usp=drive_link
	2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	85 Dokumen	82 Dokumen	96,47%	1. Penyediaan Gaji (1) 2. SPP Gaji dan tunjangan 3. SPP TPP 4. SPP GU 5. SPJ Fungsional 6. laporan SPT masa 7. laporan BKU	https://drive.google.com/drive/folders/17xveDt4TQw-9cUVMDgvpUWyk20bt5oCZ?usp=drive_link
	3.	Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	18 Dokumen	14 Dokumen	77,77%	BA Verifikasi Sept - Des (4)	https://drive.google.com/drive/folders/1RToTpm2Ig2tShZBsrBcMO7ZneK0mMg5Y?usp=drive_link
	4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	47 Dokumen	45 Dokumen	95,74%		https://drive.google.com/drive/folders/1jrfRbDenPMIH3deNBpEuPXW2XiEMIVUZ?usp=drive_link
							Diklat s.d TW IV	https://docs.google.com/spreadsheets/d/18j1arG-YIKBTqhkKcxeorr9w5hu3Hbec/edit?usp=drive_link&ouid=117297225001318802056&rtpof=true&sd=true
							Bimtek Perisai	**https://drive.google.com/drive/folders/1PQ11OEdWz2fjHHnXy0EM_bxVIjelxqyw?usp=drive_link**
	5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	- Rapat Koordinasi (36) - Fasilitasi kunjungan tamu (12) - Bahan Bacaan (1) - SPBE (1)	https://drive.google.com/drive/folders/1LnBIURns_kpMWdFiS2YH1XEPIdMi4PQl?usp=drive_link
	6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan	283 Unit	280 Unit	98,93%	BA Verifikasi dari Aset BPKAD	https://drive.google.com/drive/folders/1GkPWFgDqYmsYUiKVwpoidAW5Xnf8loj?usp=drive_link
	7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%	- Jasa Surat Menyurat (4) '- penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik(4) - Pelayanan Umum (4)	https://drive.google.com/file/d/1Z1qp78b8-bXoghFV6k8_6Dy_1XtC2rP9/view?usp=drive_link
	8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang dipelihara	90 Unit	176 Unit	195,55%	- Pemelihaan kendaraan - Pemeliharaan Mebel - Pemeliharaan Peralanan Mesin - Pemeliharaan gedung kantor	https://drive.google.com/drive/folders/1vbPyAs7Qnm2swHwnaGJBBFBJo7iHpd7A?usp=drive_link
	B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP	70%	100%	142,85%	Laporan Hasil Penialian Mandiri SPIP	https://drive.google.com/file/d/1lcBos8Qxjo0K6jgskog92-lbwvqd6wad/view?usp=drive_link
	1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	92%	91,51%	99,46	Laporan Evaluasi berkala TLHP APIP	https://drive.google.com/file/d/1WkAnmoY_fDST2JtGja5wVzils5e4wdDJ/view?usp=drive_link
			Prostatese jumlah Rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti	80%	95,43%	119.28%	PTL BPK SMT 1 2025	https://drive.google.com/file/d/15jwZVdo8P1hTIIJAquMQ7VIEcXBN_oQd/view?usp=drive_link
			Jumlah PD yang menerapkan manajemen risiko	35%	50 OPD	142,85	Dokumen RR Seluruh Perangkat Daerah	https://drive.google.com/drive/folders/1gxleRKmEoFWEPaELhAU3zcdqPW22yplo?usp=drive_link
			Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah (Mandatory) yang direviu	100%	100%	100%	REKAP PENUGASAN REVIU S.D TW IV	https://drive.google.com/file/d/1K7I-cmhQ2SabSWtvWjb2PL3oiiUUc9wz/view?usp=drive_link

Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Dokumen	Link Bukti Dukung
	2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan	11 Laporan	203 Laporan	1845%	REKAP PENUGASAN PDTT	https://drive.google.com/file/d/14IjwmNe33nE5JeIH2sRomK_VuvZQFvPV/view?usp=drive_link
	C.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)	15%	74%	493%	Laporan Pendampingan FCP	https://drive.google.com/file/d/1J3JbNEWF05c3X8AOUR1HAGiofsRFTYZf/view?usp=drive_link
	1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	2 kegiatan	2 Kegiatan	100%	klinik konsultasi	https://drive.google.com/drive/folders/199GvsIzRDmfH8OmYloXzwmyUqvtxf1Wj?usp=drive_link
	2.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	52 OPD	52 OPD	100%	PENDAMPINGAN, SAKIP, SPIP	https://drive.google.com/drive/folders/1hhptYqdo_zdnuwrneU8AMHtwsaf01Za9?usp=drive_link

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

SAMSUL HUDA, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660610 199203 1 014